



# RENJA 2021

# RENCANA KERJA

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Provinsi Kepulauan Riau



# Pendahuluan

## 1 Pendahuluan


### 1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 memprioritaskan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, peningkatan iklim investasi yang kondusif, pemantapan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat, peningkatan daya saing ekonomi dan pengembangan pusat kebudayaan melayu, dengan sasaran pembangunan pertumbuhan ekonomi  $5 \pm 1\%$ , laju inflasi  $3.5 \pm 1\%$ , indeks gini  $0.34 \pm 0.01\%$ , persentase penduduk miskin 5.68% dan indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar 75,19%.

Menyikapi RKPD tahun 2021 dalam upaya pemantapan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat, arah Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan serta Pemenuhan Hak Anak di berbagai bidang Pembangunan dan Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan. Hal ini dapat dicapai dengan mengintegrasikan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada semua kebijakan program dan kegiatan pembangunan.

Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) telah menjadi landasan dalam pencapaian kesetaraan dan keadilan gender, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas P3AP2KB) Provinsi Kepulauan Riau selaku penanggung jawab teknis Penyelenggaraan Pembangunan Daerah dalam PUG menyusun Rencana Kerja






(Renja) tahun 2021 sebagai acuan dalam pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pada tahun berkenaan.

Selain Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024, amanat penyelenggaraan PUG juga tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di Daerah, yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah. Pasal-pasal dalam Permendagri tersebut mengatur apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan PUG mencapai kesetaraan dan keadilan gender.

Guna mewujudkan hal tersebut maka perlu integrasi dalam dokumen perencanaan penganggaran. Salah satu pasal yang mengarahkan hal tersebut adalah Pasal 4 Permendagri 67 tahun 2011 yang mengamanatkan: (1) Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis OPD dan Rencana Kerja OPD.

Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra OPD) kedalam rencana, program dan penganggaran tahunan. Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah Daerah.

Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musrenbang tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan Renja OPD yang menitikberatkan



pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan OPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Renja Tahunan merupakan terjemahan dari dokumen perencanaan strategis yang sudah disusun dan ditetapkan pada perencanaan awal lima tahunan yaitu yang dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang kemudian dijabarkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) setiap Provinsi dan kemudian dijabarkan lagi kedalam Rencana Strategis masing-masing OPD pengampu. Melalui Renja Tahunan ditetapkan targettarget pembangunan yang dapat mendukung pencapaian target dari Renstra, RPJMD dan RPJMN.

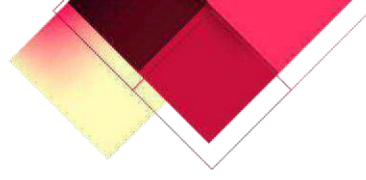
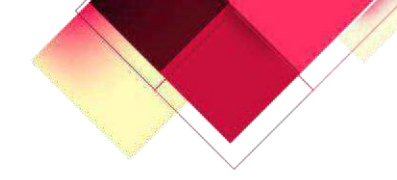
Dinas P3AP2KB sebagai Dinas Daerah yang menangani urusan wajib sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2018 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, kemudian Dinas P3AP2KB menyusun Rencana Kerja, dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Program dan Kegiatan tahun anggaran 2021.

## 1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja Dinas Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau TA. 2019 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 7) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 10) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
- 11) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah Jo Permendagri 57 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
- 16) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Prov. Kepri Tahun 2005-2025;

- 17) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau;
- 18) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41);
- 19) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 49);
- 20) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 4);
- 21) Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau;
- 22) Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 494);
- 23) Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 631);
- 24) Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi kepulauan Riau Tahun 2021



- 
- 25) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 460/813/SJ Tanggal 28 Januari 2020 Tentang Perencanaan dan Penganggaran Dalam Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
  - 26) Surat Edaran Gubernur Kepulauan Riau Nomor 050/278/BPPP-SET/2020 Tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah tahun 2021.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

#### 1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran berbagai program dan kegiatan serta menentukan sasaran dengan skala prioritas sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pada Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021.

#### 1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:


- a. Memberikan pedoman dan arah pelaksanaan pembangunan berbasis pengarusuteraan gender (PUG) pada tahun 2021.
- b. Melaksanakan pembangunan agar tepat sasaran dan tepat waktu.
- c. Memberikan penetapan alokasi anggaran yang dibutuhkan secara transparan dan akuntabel.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 adalah:

#### BAB I PENDAHULUAN





Pada bab satu menjelaskan gambaran umum penyusunan Renja perangkat daerah yang terdiri dari tentang latar belakang penyusunan renja, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan serta sistematika penyusunan Renja.

## **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019**

Bab dua memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

## **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**


Bab tiga menguraikan tentang penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas Pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas DP3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau.

## **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Pada Bab ini berisikan program dan kegiatan serta pendanaan perangkat daerah pada tahun rencana. Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dan Pendanaan Daerah merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam penyusunan program dan kegiatan.

## **BAB V PENUTUP**

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya



ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut.

## Bab

# Hasil Evaluasi Renja 2019

## 2 Hasil Evaluasi Renja 2019

### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Secara umum hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas DP3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau memenuhi target yang telah ditetapkan.

Dinas DP3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2019 mengelola anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 9.846.205.199,00,- realisasi sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp. 9.737.109.451,00,- atau 98,89% dari pagu anggaran. Sedangkan pagu anggaran Belanja Langsung berjumlah sebesar Rp. 12.299.787.730,00,- realisasi sampai dengan 31 Desember 2019, sebesar Rp. 11.896.554.469,- (96,72%). Keterangan lebih rinci, pada tabel 2.1. dibawah ini.

Tabel 2.1 ( T-C.29 )

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020  
Provinsi Kepulauan Riau

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5 + 7 + 9)	11 = (10 / 4)
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Jumlah orang yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	40	40	40	0	0	40	80	200
05.020.7	Capacity Building	Jumlah Aparatur yang mengikuti peningkatan kompetensi penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	148	37	37	0	0	37	74	50

1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	60	36	12	12	100	12	60	100
01.000.7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi keuangan	60	12	12	0	0	0	12	20
01.001.8	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	Jumlah Tenaga Administrasi Pendukung	60	36	12	12	100	12	60	100

01.004.08	Pelaksanaan Kegiatan Rutinitas Perkantoran	Terlaksananya Rutinitas Perkantoran	60	36	12	12	100	12	60	100
02.005.9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Pengadaan sarana dan Prasarana bagi Aparatur	12	12	0	0	0	0	12	100
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	60	36	12	12	100	12	60	100
	Pengadaan Sarana dan Prasarana (Mobil Dinas)	Jumlah Mobil Dinas	6	0	0	0	0	0	0	0
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Pengadaan sarana dan Prasarana bagi Aparatur	60	36	12	12	100	12	60	100
	Pengadaan Sarana dan Prasarana (Kendaraan Roda Dua)	Jumlah Kendaraan Roda Dua	5	0	0	0	0	0	0	0
	Pengembangan Data / Informasi	Data/ informasi dan aplikasi sistem informasi terkelola dengan baik	60	36	12	12	100	12	60	100
15.000.8	Pelatihan dan Pendampingan Petugas Pengumpul Data	Jumlah SKPD memiliki ketrampilan menyusun data pilah	195	117	39	39	100	39	195	100
15.000.5	Forum Data Pilah Gender dan Anak	Jumlah SKPD yang mengikuti Forum Data Pilah	195	117	39	39	100	39	195	100
	Penyusunan Profil Gender	Jumlah Dokumen Profil Gender	5	3	1	1	100	0	4	80
15.001.1	Pemetaan Lembaga Peduli Perempuan dan Anak Se Provinsi Kepri	Jumlah Dokumen Lembaga Peduli Perempuan dan Anak	1	0	1	0	0	0	0	0
	Survey, verifikasi dan monitoring pada kegiatan hibah/soisal SKPD	Tersedianya Dokumen hasil dari survey dan monitoring terkait kegiatan hibah sosial	1	0	1	0	0	0	0	0

	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	3	2	1	0	0	0	2	66.67
--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	-------



	Penyusunan, Evaluasi dan Revisi Renstra DP3AP2KB	Dokumen Renstra	1	1	0	0	0	0	1	100
	Pendataan dan Penyusunan Laporan Inventaris Barang/Jasa	Dokumen Inventaris Barang	1	1	0	0	0	0	1	100
21.009.5	Rapat kerja sinkronisasi program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Kepri	jumlah rapat kerja	5	1	1	0	0	0	1	20
21.019.2	Evaluasi program pemberdayaan perempuan dan anak tingkat Prov. Kepri (APE)	Jumlah Kab/Kota yang di Evaluasi	35	7	7	0	0	7	14	40
21.013.5	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan urusan PP, PA dan KB (PUG, Anak, PP dan KB)	Jumlah Urusan yang di Monev (PP, PA, PUG dan KB)	20	4	4	3	75	0	7	35
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pemenuhan kebutuhan pakaian petugas dan penunjang disiplin aparat	37	37	37	0	0	0	37	100
03.002.3	Pembinaan Mental Pegawai	Jumlah Pegawai yang dibina	37	37	37	0	0	0	37	100
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah Laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun.	10	6	2	2	100	2	10	100
04.001.2	Penyusunan LAKIP	tersusunnya dokumen LAKIP	5	3	1	1	100	1	5	100
04.000.9	Penyusunan laporan Keuangan dan pembangunan	Tersusunnya laporan pembangunan	5	3	1	1	100	1	5	100
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	persentase perempuan (keluarga miskin) yang mendapatkan peningkatan kapasitas lifeskill	85.71	57.14	50	57.14	114.28	80	194.28	226.7
	Peningkatan Ketahanan dan Kualitas Keluarga	Jumlah orang terlatih untuk peningkatan ketahanan dan kualitas keluarga	1000	600	200	120	60	120	840	84

85.002.0	Pengembangan upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah perempuan terlatih untuk peningkatan kesejahteraan keluarga	600	240	0	0	0	90	330	55
	Pemantapan dan Peningkatan Peran Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera	meningkatkan peran perempuan menuju Keluarga Sehat Sejahtera	250	150	0	0	0	0	150	60
	Pelatihan pemanfaatan lahan kosong pekarangan menggunakan system hidroponik	jumlah perempuan terlatih dalam peningkatan produktivitas lahan	50	0	0	0	0	0	0	0
	Pelatihan Perempuan kepala keluarga	Jumlah kepala keluarga yang terlatih	50	0	10	0	0	0	0	0
	Pelatihan Good Parenting	meningkatkan pemahaman orang tua dalam pola asuh keluarga	50	50	15	0	0	0	50	100
	Pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	Terintegrasinya Pelayanan Perempuan Produktif	1	1	1	0	0	0	1	100
	Renovasi Gedung (P2KSS)	Terenovasinya gedung P2KSS	1	0	1	0	0	0	0	0
	Pemantapan Ketahanan Keluarga di Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga	Jumlah orang terlatih untuk peningkatan ketahanan keluarga di Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga	30	30	0	0	0	0	30	100
	Survey Ketahanan Keluarga	Tergambarnya kondisi Kulitas keluarga	50	50	0	0	0	0	50	100
	Partisipasi Masyarakat dalam Peningkatan Kualitas Keluarga	Meningkatnya Peran masyarakat dalam Peningkatan Kualitas Keluarga	120	50	50	50	100	0	100	83.33
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	28.49	30.52	31.49	30.52	96.92	30.01	91.05	319.59

	Koordinasi dan Fasilitasi Layanan Pemberdayaan Perempuan bidang ekonomi	Jumlah Layanan yang di Fasilitasi bidang ekonomi	500	170	0	0	0	0	170	34
83.003.7	Pelatihan Entrepreneurship bagi pelaku usaha perempuan	Jumlah Pelaku usaha perempuan	250	150	50	200	400	175	525	210

	Penguatan dan Revitalisasi Organisasi Perempuan Politik di Prov. Kepri	Jumlah Organisasi Perempuan Politik	50	50	0	0	0	0	50	100
83.003.8	Capacity Building Politik Perempuan di Prov. Kepri	Jumlah Perempuan Politik	190	90	50	50	100	32	172	90.53
	Workshop Pemberdayaan Perempuan Prov. Kepri	Jumlah Perempuan yang dilatih ketrampilan	116	100	0	0	0	0	100	86.21
83.001.0	Peningkatan Kapasitas Perempuan bidang ekonomi	Jumlah Perempuan yang ditingkatkan kapasitasnya bidang ekonomi	250	150	50	40	80	50	240	96.00
	Workshop Peningkatan Peran Perempuan dalam Pembangunan	Jumlah perempuan yang ditingkatkan kapasitasnya	40	40	0	0	0	0	40	100
	Bimtek PPRG bagi PPTK OPD di Provinsi Kepri	Terlatihnya PPTK OPD dalam Penyusunan Anggaran yang Responsif Gender	80	42	0	0	0	0	42	52.5
83.001.9	Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah organisasi wanita yang dibina	100	60	20	20	100	20	100	100
	Seminar dan Expo Alisa Khadijah ICMI Provinsi Kepri	Jumlah perempuan yang terlibat dalam pengembangan dunia usaha	80	80	0	0	0	0	80	100
	Pelatihan Perempuan Nelayan di Kabupaten Linga	Terlatihnya Perempuan Nelayan di kabupaten Lingga	50	50	0	0	0	0	50	100
83.004.1	Lokakarya Pengembangan Politik Perempuan di Provinsi Kepri	Meningkatnya perempuan yang duduk di legislatif	50	50	30	0	0	0	50	100

83.000.6	Koordinasi Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan/TPPO	Jumlah pertemuan koordinasi gugus tugas pencegahan dan penanganan kekerasan/TPPO	10	6	2	2	100	2	10	100
83.004.3	Pengembangan dan Pemantapan Jejaring pelayanan dan perlindungan perempuan	Jumlah Pemantapan Jejaring Pelayanan dan Perlindungan Perempuan	3	2	2	0	0	0	2	66.67
83.004.4	Koordinasi dan Pemantapan Implementasi SPPTPPKTP	Jumlah Rakor Implementasi SPPT - PPKTP	4	2	2	0	0	1	3	75

	Pembentukan Perda Perlindungan Hak Perempuan	Jumlah paket KIE perlindungan hak perempuan	1	0	0	0	0	0	0	0
83.004.5	Pembentukan dan sosialisasi Pergub implementasi Perda Perlindungan Hak Perempuan	Meningkatnya Upaya Perlindungan Perempuan	2	0	1	0	0	0	0	0
	Sosialisasi dan Publikasi Perlindungan Hak Perempuan	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terkait Perlindungan Perempuan dan Anak	5	2	1	0	0	0	2	40
	Rutinitas UPTD P2TP2A Provinsi Kepri	Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan UPTD P2TP2A	100	100	100	100	100	100	300	300
	Pelayanan Rumah Singgah Engku Putri	Pelayanan Kebutuhan Rumah Singgah Engku Putri	60	24	0	0	0	0	24	40
	Pelayanan Penerimaan Pengaduan dan Penjangkauan Perempuan dan Anak Korban kekerasan	Persentase Pengaduan kekerasan yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	300	300
83.004.9	Renovasi Kantor UPTD P2TP2A Provinsi Kepri	Meningkatnya Pelayanan Korban Kekerasan terhadap perempuan dan anak	1	1	1	1	100	0	2	200
83.005.0	Pelayanan Rehabilitasi, Pemulangan dan Reintegrasi	Persentase Jumlah Korban kekerasan yang direhabilitasi dan dipulangkan ke Daerah Asal	100	100	100	100	100	100	300	300

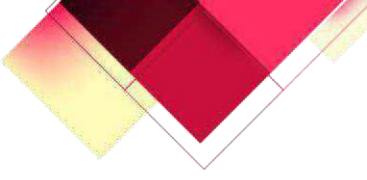
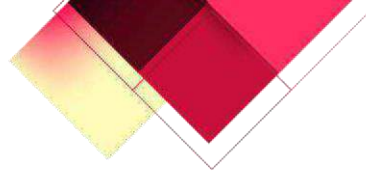


	Perempuan dan anak korban kekerasan									
83.000.8	Pencatatan dan Pelaporan Data Kekerasan terhadap perempuan	Jumlah dokumen pelaporan	5	3	1	1	100	0	4	80
	Pengembangan dan Pembinaan P2TP2A Prov. Kepri	Jumlah fasilitasi Perlindungan Hak Perempuan	60	24	0	0	0	0	24	40
	Sosialisasi dan Publikasi Desa/Kelurahan Bebas Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Persentase lembaga layanan perlindungan perempuan yang ditingkatkan kapasitasnya	35	35	0	0	0	0	35	100
	Sosialisasi dan publikasi Perlindungan Perempuan dan Anak	Jumlah paket sosialisasi dan publikasi	5	3	0	0	0	0	3	60

	Pengembangan dan Pembinaan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Prov. Kepri	Jumlah Unit pelayanan	1	1	0	0	0	0	1	100
	Fasilitasi Pembentukan Desa/Kelurahan Bebas Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Persentase lembaga layanan perlindungan perempuan yang ditingkatkan kapasitasnya	100	100	100	100	100	0	200	200
	Pengembangan SDM Peduli Kekerasan Terhadap Perempuan dan anak	Jumlah SDM peduli terhadap perempuan dan anak	15	10	0	0	0	0	10	66.67
	Sosialisasi, Edukasi dan Publikasi Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terkait Perlindungan Perempuan dan Anak	50	50	0	0	0	0	50	100
	Seminar Dharma Wanita dan Peningkatan Peran Wanita Kepri	Jumlah peserta seminar	50	50	0	0	0	0	50	100
	Sosialisasi E Reporting Program Kerja Dharma Wanita Persatuan Se Prov. Kepri	Jumlah peserta sosialisasi	50	50	0	0	0	0	50	100

	Study Komparatif Dharma Wanita Persatuan	Jumlah peserta Study	50	50	0	0	0	0	50	100
	Pelatihan Keterampilan bagi anggota Dharma Wanita Persatuan prov kepri	Jumlah anggota Dharma Wanita Persatuan	50	50	50	0	0	0	50	100
83.005.4	Penguatan dan pengembangan kapasitas Dharma Wanita Persatuan prov kepri	Jumlah anggota Dharma Wanita Persatuan	250	150	50	50	100	50	250	100
83.003.6	Peningkatan kualitas pendidikan anak DWP provinsi kepri	Jumlah anak DWP yang ditingkatkan kualitasnya	200	150	50	50	100	0	200	100
83.005.6	Seminar ketahanan keluarga anggota Dharma Wanita Persatuan	Jumlah anggota DWP	200	150	50	50	100	0	200	100
	Peningkatan Kapasitas Perempuan bidang politik/Hukum/Sosial	Jumlah perempuan politik yang ditingkatkan kapasitasnya	120	90	0	0	0	0	90	75
	Peningkatan Keterampilan perempuan Provinsi Kepri	Jumlah peserta pelatihan	200	120	0	0	0	0	120	60
	Peningkatan Kapasitas Perempuan dalam Pembangunan	Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan	200	120	0	0	0	0	120	60

83.002.2	Sosialisasi Perda Perlindungan Hak Perempuan	Jumlah peserta sosialisasi	100	0	0	0	0	0	0	0
	Pemantapan Peran Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya Peran Masyarakat Terkait Perlindungan Perempuan dan Anak	45	45	0	0	0	0	45	100
83.005.7	Pemantapan Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan	Meningkatnya Persentase Tenaga Profesional Perempuan	100	100	0	0	0	0	100	100
	Pemantapan perlindungan tenaga kerja situasi khusus dan korban bencana	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja situasi khusus dan korban bencana	250	150	50	0	0	50	200	80
	Pengembangan dan Pendampingan Forkomwil PMP3AP2KB	meningkatkan peran lembaga masyarakat terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak	50	50	0	0	0	0	50	100
83.005.9	Sosialisasi Penguatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan (He For She) Tingkat Prov. Kepri	Jumlah Peserta Sosialisasi	1200	600	200	0	0	0	600	50
83.001.8	Sosialisasi Program Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak (Jelajah Three Ends ) Tingkat Prov. Kepri	Jumlah Peserta Sosialisasi	1100	600	200	0	0	150	750	68.18
	Perbaikan Tempat Parkir dan Pertamanan UPTD P2TP2A Provinsi Kepri	Tersedianya Tempat Parkir dan Pertamanan UPTD P2TP2A Provinsi Kepri	1	1	1	1	100	0	2	200
	Peningkatan Fasilitas Pelayanan Rumah Singgah pada UPTD P2TP2A	Meningkatnya Pelayanan Rumah Singgah pada UPTD P2TP2A	1	1	1	1	100	0	2	200
	Renovasi Bangunan Rumah Singgah pada UPTD P2TP2A Provinsi Kepri	Tersediannya Rumah Singgah pada UPTD P2TP2A Provinsi Kepri yang Responsif terhadap Korban	1	1	1	1	100	0	2	200
	Program Perlindungan Anak	Rasio Kekerasan Terhadap Anak	3.66	2.55	3.8	2.55	67.11	3.7	8.8	240.44
		Persentase Kab/Kota yang melaksanakan KLA dengan pencapaian Peringkat Pratama	85.71	100	57.14	100	175	57.14	257.14	300

84.000.6	Pengembangan Kota Layak anak	Terciptanya Lingkungan yang Aman dan Responsif terhadap Anak	35	7	7	7	100	7	21	60
	Pengembangan Kelembagaan Porum Anak	Meningkatnya Jumlah Forum Anak di Provinsi Kepri	166	116	0	0	0	8	124	74.70



84.000.3	Ajang Temu Anak Povinsi Kepri	Terpenuhinya Hak Anak untuk Berkumpul, Berkreasi, Berpartisipasi dan Bersosialisasi	3500	2100	700	700	100	0	2800	80
	Pengembangan Tempat Pengasuhan Anak (TPA)	Meningkatnya Pelayanan Tempat Pengasuhan Anak (TPA)	1	1	0	0	0	0	1	100
84.000.4	Pengembangan Taman Pengasuhan Anak (TPA)	Terpenuhinya Hak Anak	140	70	35	35	100	0	105	75
	Peningkatan Kapasitas Orangtua dan Anak terhadap pemenuhan dan perlindungan hak anak	Meningkatnya Pemahaman Orangtua dan Anak terhadap pemenuhan dan perlindungan hak anak	50	0	0	0	0	0	0	0
	Peningkatan Kapasitas Guru PAUD Terhadap Pemenuhan Hak Anak	Meningkatnya Pemahaman Guru PAUD Terhadap Pemenuhan Hak Anak	220	100	0	0	0	0	100	45.45
84.001.3	Penguatan dan Pengembangan KPPAD	Menurunnya Rasio kekerasan Terhadap Anak	60	38	12	12	100	0	50	83.33
	Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Anak Jalanan	Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga Anak Jalanan	5	0	0	0	0	0	0	0.00
84.000.8	Penguatan dan Pengembangan PATBM	Meningkatnya Kepedulian Masyarakat dari Tindak Kekerasan dan Perlakuan Salah	164	90	30	30	100	5	125	76.22
84.001.9	TOT bagi toma, toga, mubaligh/ Penceramah dan lembaga pemerhati anak	Meningkatnya Pemahaman Toga, Toma, Mubaligh/Penceramah dan Lembaga Pemerhati Anak terhadap Pemenuhan Hak Anak	120	60	30	0	0	0	60	50
	Pengembangan Telepon Sahabat Anak	Terpenuhinya Hak Anak untuk Berpartisipasi dan Bersosialisasi	1	1	0	0	0	0	1	100
	Pelatihan KHA	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat tentang KHA	120	80	0	0	0	0	80	66.67

	Klinik Terapi Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah anak Berkebutuhan Khusus yang mendapat pelayanan	35	0	0	0	0	0	0	0
	Pengembangan Pusat Konsultasi Keluarga (PUSPAGA)	Tersedianya Pusat Konsultasi Keluarga (PUSPAGA)	60	36	12	12	100	12	60	100

	Penguatan dan Pengembangan Forum Anak	Jumlah Forum Anak Tingkat Kabupaten/Kota yang terfasilitasi	35	21	7	7	100	0	28	80
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase anggaran responsif gender (ARG) terhadap belanja langsung APBD Provinsi	7	11.24	5.7	11.24	197	6.5	28.98	414
82.000.1	Forum Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) Provinsi Kepri	Terlaksananya Forum Pertemuan bagi Pokja PUG dan Focal Point Gender di OPD Prov. Kepri	200	120	40	40	100	40	200	100.00
82.000.2	Pengembangan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG dan PPRG di Provinsi Kepri	Meningkatnya Pelaksanaan PUG dan PPRG di Provinsi Kepri	200	120	39	0	0	40	160	80.00
82.000.3	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PUG dan PPRG di Kab/Kota dan Provinsi Kepri	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi PUG dan PPRG di Kab/Kota dan Provinsi Kepri	35	7	7	7	100	0	14	40
	Bimtek PPRG bagi PPTK OPD di Prov. Kepri	Terlatihnya PPTK OPD dalam Penyusunan Anggrana yang Responsif Gender	39	39	0	0	0	0	39	100
	Sosialisasi dan Advokasi Pelaksanaan PUG dan PPRG di Provinsi Kepri	Meningkatnya Pemahaman tentang Pelaksanaan PUG dan PPRG di Provinsi Kepri	540	300	0	0	0	0	300	55.56
	Program Keluarga Berencana	Pembentukan Kampung KB	4	2	1	1	100	1	4	100
		Persentase penggunaan alatOalat kontrasepsi (CPR)	57.7	78.6	49.89	78.6	158	52.8	210	363.95
	Fasilitasi Pelayanan KB Gratis Bagi Masyarakat melalui BBGRM	Meningkatnya Jumlah peserta KB Baru	500	350	0	0	0	0	350	70

	Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kampung KB	Meningkatnya Jumlah Kampung KB	7	4	1	1	100	0	5	71.43
100.00.14	Sosialisasi dan Advokasi, KIE tentang Pengendalian Penduduk dan KB di Prov. Kepri	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan dan KB	500	250	100	1	1	1	252	50.4
100.00.5	Pemantapan dan Pembinaan BKB, BKL, BKR (Tri Bina)	Meningkatnya Kualitas Tri Bina	100	50	100	0	0	0	50	50
	Pengembangan Sistem Informasi Data Dalduk dan KB	Tersedianya Sistem Informasi Data Dalduk dan KB	1	0	0	0	0	0	0	0
	Peran Pemeintah dalam meningkatkan ketahanan keluarga	meningkatnya ketahanan keluarga	150	90	0	0	0	0	90	60
100.00.18	Pengembangan Program KKBPKD Tingkat Provinsi Kepri	Terlaksananya Pengembangan Program KKBPKD Tingkat Provinsi Kepri	1	0	1	0	0	0	0	0
	Pemetaan terhadap Pengendalian Penduduk dan KB	Tersedianya Peta Pengendalian Penduduk dan KB	1	0	0	0	0	0	0	0
	Rapat Kerja Sinkronisasi Kebijakan PEMDA Kab/Kota dalam Rangka Pengendalian Penduduk dan KB	Terdianya Renja PEMDA Kab/Kota tentang Pengendalian Penduduk dan KB	3	0	0	0	0	0	0	0
100.00.17	Pengembangan dan Pembentukan Program Kampung KB Terintegrasi	Terbentuknya Kampung KB Terintegrasi di Provinsi Kepri	4	2	1	1	100	1	4	100
	Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan PIK R/M	Tersianya PIK Remaja dan Masyarakat	3	1	0	0	0	0	1	33

Selaras dengan pernyataan diatas, bahwa belanja langsung (BL) yang terdiri dari 10 Program dan dijabarkan dalam 33 kegiatan, seluruhnya telah terpenuhi terealisasi hampir 100% (keuangan 97,69%) sedangkan fisik tercatat 100% terealisasi, dan tidak terdapat program/kegiatan yang tidak memenuhi atau melebihi target yang telah ditetapkan.

Secara umum, capaian anggaran program/kegiatan pada Renstra Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016–2021, hingga Juni tahun anggaran 2020 sebesar 56,33% dengan disparitas ketersediaan anggaran dalam program/kegiatan yang belum memadai dari APBD Provinsi Kepulauan Riau selama 4 tahun ini. Namun demikian tidak meyorutkan Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau untuk mengejar capaian target kinerja yang telah digariskan.

Disparitas capaian anggaran program/kegiatan pada Renstra hingga awal tahun 2020 sangat bervariasi, namun demikian Dinas P3AP2KB selalu menekankan prioritas anggaran yang mendukung atau mempunyai daya ungkit terhadap capaian indikator-indikator kinerja OPD, hal tersebut tercermin dalam distribusi anggaran pada program/kegiatan yang mendukung indikator-indikator kinerja.

Terbentuknya UPTD P2TP2A pada tahun 2018 operasionalnya masih mengacu kepada Renstra yang sudah ada, mengingat Renstra sudah tidak dapat dilakukan revisi lagi, sementara dengan bertempat di gedung baru dengan kebutuhan anggaran operasional, teknis dan non teknis sangat diperlukan. Oleh sebab itu, Dinas P3AP2KB mengambil kebijakan dalam penyusunan program/kegiatan tahun berikutnya untuk UPTD P2TP2A disamping dengan memanfaatkan program/kegiatan yang ada pada Renstra, juga melakukan beberapa kebijakan, antara lain :

1. Meningkatkan komitmen dan kerjasama dari Kepala Dinas, UPTD, Kepala Bidang, Pelaksana Kegiatan, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan waktu yang telah ditetapkan.
2. Program/kegiatan yang direncanakan, merupakan implikasi program/ kegiatan yang sangat dibutuhkan masyarakat dari berbagai kalangan dan menyentuh grass root di masyarakat.

Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil pada penyusunan Renja tahun 2021 adalah:



1. Meningkatkan sinkronisasi program/kegiatan untuk, mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung capaian target kinerja.
2. Mewujudkan konsistensi anggaran untuk semaksimal mungkin menghindari efisiensi anggaran kegiatan yang telah ditetapkan.
3. Meningkatkan koordinasi dengan TAPD, seluruh stake holders dan lintas sektor yang berkaitan.
4. Meningkatkan anggaran pembiayaan program/kegiatan yang bersumber dari Kementerian/Lembaga (Kemen.PP-PA) dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat.

Sedangkan realisasi anggaran per 31 Desember 2019 untuk masing-masing program/kegiatan dapat dilihat dalam tabel 2.2 dibawah ini.

Tabel 2.2  
Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan  
per 31 Desember 2019

No.	Program	Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi			Sisa anggaran
				Realisasi Keuangan	(%)	Fisik (%)	
	Belanja Tidak Langsung	Belanja Pegawai	9,846,205,199	9,737,109,451	98.89	100.00	109,095,748.00
1	Program keluarga berencana		130,000,000.00	129,965,450.00	99.97		34,550.00
		Pengembangan Kampung KB	130,000,000.00	129,965,450.00	99.97	100.00	34,550.00
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		2,282,412,000.00	2,253,345,295.00	98.73		29,066,705.00
		Penyediaan jasa tenaga pendukung	332,150,000.00	324,599,750.00	97.73	100.00	7,550,250.00

		Pelaksanaan Kegiatan Rutinitas Perkantoran	1,950,262,000.00	1,928,745,545.00	98.90	100.00	21,516,455.00
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		715,375,730.00	714,570,304.00	99.89		805,426.00
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	715,375,730.00	714,570,304.00	99.89	100.00	805,426.00
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100,000,000.00	94,005,282.00	94.01		5,994,718.00
		Penyusunan laporan keuangan	25,000,000.00	24,974,400.00	99.90	100.00	25,600.00
		Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	75,000,000.00	69,030,882.00	92.04	100.00	5,969,118.00

5	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak		75,000,000.00	74,996,157.00	99.99		3,843.00
		Forum Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) Provinsi Kepri	75,000,000.00	74,996,157.00	99.99	100.00	3,843.00
6	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan		5,170,000,000.00	4,910,031,280.00	94.97		259,968,720.00
		Koordinasi Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan TPPO	265,000,000.00	228,450,000.00	86.21	100.00	36,550,000.00
		Pencatatan dan Pelaporan Data Kekerasan	100,000,000.00	98,146,806.00	98.15	100.00	1,853,194.00
		Peningkatan	526,000,000.00	515,224,621.00	97.95	100.00	10,775,379.00

		Kapasitas Perempuan bidang ekonomi					
		Pembinaan Organisasi Perempuan	1,000,000,000.00	981,507,320.00	98.15	100.00	18,492,680.00
		Peningkatan Kualitas Pendidikan Anak Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kepri	152,000,000.00	144,658,599.00	95.17	100.00	7,341,401.00
		Pelatihan Entrepreneurship bagi pelaku usaha perempuan	350,000,000.00	328,331,329.00	93.81	100.00	21,668,671.00
		Capacity Building Politik Perempuan di Prov. Kepri	159,000,000.00	120,406,042.00	75.73	100.00	38,593,958.00
		Pelayanan UPTD P2TP2A Provinsi Kepri	970,000,000.00	932,362,939.00	96.12	100.00	37,637,061.00
		Pelayanan Penerimaan Pengaduan dan Penjangkauan Perempuan dan Anak Korban kekerasan	250,000,000.00	247,220,639.00	98.89	100.00	2,779,361.00

		penguatan dan pengembangan kapasitas Dharma Wanita Persatuan prov kepri	648,000,000.00	578,790,650.00	89.32	100.00	69,209,350.00
		Seminar ketahanan keluarga anggota Dharma Wanita Persatuan	150,000,000.00	140,191,085.00	93.46	100.00	9,808,915.00
		Perbaikan Tempat Parkir dan Pertamanan UPTD P2TP2A Provinsi Kepri	200,000,000.00	198,302,800.00	99.15	100.00	1,697,200.00

		Peningkatan Fasilitas Pelayanan Rumah Singgah pada UPTD P2TP2A	200,000,000.00	198,124,450.00	99.06	100.00	1,875,550.00
		Renovasi Bangunan Rumah Singgah pada UPTD P2TP2A Provinsi Kepri	200,000,000.00	198,314,000.00	99.16	100.00	1,686,000.00
7	Program Perlindungan Anak		2,682,000,000.00	2,589,573,425.00	96.55		92,426,575.00
		Ajang Temu Anak Povinsi Kepri	250,000,000.00	247,966,760.00	99.19	100.00	2,033,240.00
		Pengembangan Taman Pengasuhan Anak (TPA) Percontohan Provinsi Kepri	345,000,000.00	329,732,394.00	95.57	100.00	15,267,606.00
		Penguatan dan Pengembangan PATBM	890,000,000.00	861,597,279.00	96.81	100.00	28,402,721.00
		Penguatan dan Pengembangan KPPAD	800,000,000.00	759,991,498.00	95.00	100.00	40,008,502.00
		Pengembangan Pusat Konsultasi Keluarga (PUSPAGA) dan klinik tumbuh kembang anak	137,000,000.00	136,849,000.00	99.89	100.00	151,000.00
		Penguatan dan Pengembangan Forum Anak	260,000,000.00	253,436,494.00	97.48	100.00	6,563,506.00
8	Program Peningkatan Kualitas Keluarga		670,000,000.00	667,504,234.00	99.63		2,495,766.00
		Partisipasi Masyarakat dalam Peningkatan Kualitas Keluarga	470,000,000.00	468,582,429.00	99.70	100.00	1,417,571.00
		Peningkatan Ketahanan dan Kualitas Keluarga	200,000,000.00	198,921,805.00	99.46	100.00	1,078,195.00
9	Program keluarga berencana		75,000,000.00	73,544,100.00	98.06		1,455,900.00

		Sosialisasi dan Advokasi, KIE tentang Pengendalian Penduduk dan KB di Prov. Kepri	75,000,000.00	73,544,100.00	98.06	100.00	1,455,900.00
10	Program Pengembangan Data/Informasi		235,000,000.00	226,535,733.00	96.40		8,464,267.00
		Forum Data Pilah Gender dan Anak	135,000,000.00	133,883,719.00	99.17	100.00	1,116,281.00
		Pelatihan dan Pendampingan Petugas Pengumpul Data	100,000,000.00	92,652,014.00	92.65	100.00	7,347,986.00
11	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		165,000,000.00	162,483,209.00	98.47		2,516,791.00
		Monitoring dan Evaluasi Peyelenggaraan urusan PP, PA dan KB (PUG, Anak, PP dan KB)	165,000,000.00	162,483,209.00	98.47	100.00	2,516,791.00
JUMLAH			22,145,992,929.00	21,633,663,920.00	97.69	100.00	512,329,009.00

Adapun evaluasi pencapaian masing-masing program dapat dilihat dibawah ini :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi perkantoran digunakan untuk mendukung kelancaran jalannya kegiatan rutinitas administrasi perkantoran. Ada 2 kegiatan dalam program ini yang digunakan untuk mewujudkan ketersediaan / kesiapan administrasi perkantoran, pembayaran tenaga pendukung (PTT), fasilitasi rapat koordinasi internal maupun eksternal, konsultasi dan koordinasi baik di tingkat kab/kota dalam Provinsi Kepri maupun luar Provinsi serta untuk pembayaran honorarium pengelola keuangan daerah.

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Program ini diperuntukkan untuk ketersediaan sarana dan prasarana kantor serta pemeliharaan taman dan sanitasi.



3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan  
Program ini meliputi kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kegiatan ini sudah dilaksanakan dengan realisasi 100%.
4. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Program ini diperuntukkan untuk menyiapkan sumberdaya manusia dalam mengelola Anggaran Responsif Gender di OPD Provinsi, juga menyiapkan aparatur untuk menjadi Fasilitator di Kabupaten/Kota.
5. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan  
Program ini meliputi peningkatan SDM perempuan dalam keterampilan, politik serta peningkatan kualitas sarana, prasarana dan aparatur UPTD P2TP2A. Kegiatan ini sudah dilaksanakan 100%.
6. Program Perlindungan Anak  
Program ini diperuntukkan untuk urusan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak serta Komisi Pengawasan Perlindungan Anak Daerah. Kegiatan ini sudah dilaksanakan 100%.
7. Program Peningkatan Kualitas Keluarga  
Program ini ditujukan untuk urusan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Kegiatan ini sudah dilaksanakan 100%.
8. Program Keluarga Berencana  
Program ini merupakan salah satu program prioritas utama pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepri. Program ini dirancang untuk mencapai sasaran strategis berupa persentase pemakaian alat kontrasepsi (CPR). Semua kegiatan sudah dilaksanakan 100%.
9. Program Pengembangan Data/Informasi

Program ini ditujukan untuk penyiapan SDM dalam mengelola data terpilah gender dan anak mengingat data terpilah menjadi salah satu prasyarat utama dalam penilaian Anugerah Parahita Ekapraya Tahun 2020. Semua kegiatan yang mendukung program ini sudah dilaksanakan 100%.

#### 10. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini bertujuan untuk mengevaluasi seluruh Kabupaten/Kota dalam menyiapkan ketersediaan indikator data terpilah gender dan anak. Semua kegiatan yang mendukung program ini sudah dilaksanakan 100%.

### 2.2 Analisa Pelayanan OPD

Sesuai dengan Tugas dan Fungsi dari Dinas P3AP2KB yaitu membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi, maka ditetapkan indikator pembangunan yang mendukung fungsi dimaksud, antara lain :

1. Dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak serta Pemenuhan Hak Anak, ditetapkan indikator yang harus dicapai yaitu Rasio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO, Rasio Kekerasan terhadap Anak dan Persentase Kab/Kota yang melaksanakan KLA dengan capaian Peringkat Pratama
2. Dalam memberdayakan perempuan ditetapkan indikator Persentase perempuan (keluarga miskin) yang mendapatkan peningkatan kapasitas lifeskill dan Indikator Persentase ARG terhadap Belanja Langsung APBD Provinsi, dimana perlunya penyusunan perencanaan Anggaran Responsif Gender dari setiap OPD yang ada di Provinsi Kepulauan Riau.
3. Dalam Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditetapkan indikator Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (CPR) dan Pembentukan Kampung KB di Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau telah merealisasikan capaian kinerja masing-masing program/kegiatan rata-rata 100% dan

realisasi keuangan rata- rata 97,69%. Namun ada beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

1. Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
2. Menurunnya ketahanan keluarga dalam menciptakan keluarga sejahtera dan harmonis;
3. Rendahnya Komposit Pembangun IDG (Keterwakilan Perempuan dalam Politik, Jabatan Publik, Kontribusi Perempuan dalam Pendapatan);
4. Belum optimalnya pelaksanaan PUG dalam Pembangunan Daerah.

Adapun capaian kinerja pelayanan Dinas P3AP2KB dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

**Tabel 2.2 (T-C.30)**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan**  
**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk**  
**Dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau**

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pembentukan Kampung KB			1	1	1	1	1	1	1	1	
2	Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (CPR)			47.73	49.89	49.73	50.73	57.7	78.60	78,90	79,02	
3	Rasio Kekerasan terhadap Anak			3.94	3.8	3.7	3.66	2.56	3.09	2,96	2,83	
4	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan KLA dengan capaian Peringkat Pratama			42.85	71.42	85.71	85.71	71.43	100	100	100	Target pada 2020 Peringkat Madya 2 Kab/Kota dan 2 Kab/Kota
5	Persentase ARG terhadap Belanja Langsung APBD Provinsi			5.5	5.7	6.5	7	9.32	11.24	11,50	12	
6	Rasio kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO			32.6	31.5	30.01	28.49	28.08	30.52	29,5	28.5	

7	Persentase perempuan (keluarga miskin) yang mendapatkan peningkatan kapasitas lifeskill			1	1.16	1.32	1.48	1.13	1.16	1.19	1,22	
---	---	--	--	---	------	------	------	------	------	------	------	--

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk indicator Pembentukan Kampung KB sudah mencapai target sebanyak 2 Kampung KB sampai dengan tahun 2019 dan Persentase Pemakaian Kontrasepsi (CPR) sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu dari target 49,89 % tercapai 78,60 % pada tahun 2019.

Untuk Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan ditargetkan 31,5 dimana diperkirakan dari 100.000 penduduk perempuan, 31 orang akan mengalami kekerasan termasuk TPPO. Tapi realisasinya OPD dapat menekan kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan, dimana dari 100.000 penduduk perempuan di Provinsi Kepulauan Riau, hanya 30,52 yang mengalami kekerasan termasuk TPPO. Penekanan kasus ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain : adanya program pencegahan berupa KIE kepada masyarakat dan program-program peningkatan ekonomi perempuan dan pelaksanaan strategi Pengarusutamaan Gender. Begitu juga Rasio Kekerasan Terhadap Anak, dari target rasio 3,8, dapat ditekan menjadi 3.09 dengan perhidungan diperkirakan dari 10.000 anak, 3,8 anak akan mengalami kekerasan. Tetapi dapat ditekan menjadi 3,09 anak yang mengalami kekerasan.

Sementara dalam Pemenuhan Hak Anak, indicator pencapaian Kota Layak Anak (KLA) dengan Tingkat Pratama juga sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu dari 71,42 % menjadi 100 %., dimana 7 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau sudah memperoleh penghargaan KLA Tingkat Pratama. Sehingga untuk tahun tahun berikutnya, Dinas P3AP2KB menargetnya 2 Kabupaten/Kota akan mendapatkan penghargaan KLA tingkat Madya.

Indikator Persentase ARG terhadap Belanja Langsung APBD Provinsi merupakan indicator yang mencapainya tergantung pada kerjasama dari semua OPD agar menyusun Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), dimana setiap OPD diwajibkan untuk memenuhi Surat Edaran (SE) Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 120/3723/DP3AP2KB/SET Hal : Usulan Program Tahun 2019 yang Responsif Gender minimal 2 Program 4 Kegiatan. Karena melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender dari setiap OPD, Keadilan dan Kesetaraan Gender bisa tercapai.

Indikator Persentase perempuan (keluarga miskin) yang mendapatkan peningkatan kapasitas lifeskill juga sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu 1,16 %.

## 2.3 Isu-isu Penting Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

## Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kepri

Dalam rangka mencapai kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2021 ada beberapa isu penting yang harus diperhatikan yaitu:

1. Rendahnya kontribusi perempuan dalam pendapatan
2. Rendahnya kontribusi perempuan di jabatan politik dan jabatan publik. Ditandai dengan rendahnya perempuan yang menjadi anggota DPRD dan perempuan yang menduduki jabatan eselon II.
3. Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO, dan
4. Kasus kekerasan terhadap anak cenderung meningkat.

### 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Visi Gubernur telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Kepri 2016-2021 yaitu Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai bunda tanah melayu yang sejahtera, berakhlak mulia, ramah lingkungan dan unggul di bidang maritim. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan 9 misi, yang salah satunya adalah misi yang didukung oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kepri yaitu Meningkatkan derajat kesehatan, kesetaraan gender, penanganan kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Dalam Rancangan awal RKPD Provinsi Kepri tahun 2021 telah ditetapkan Tema pembangunan 2021 yaitu: Perwujudan Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim.

Sedangkan prioritas RKPD Provinsi Kepulauan Riau 2021 adalah:

- a. Pemantapan Kepri sebagai Bunda Tanah Melayu;
- b. Peningkatan Pendapatan dan Kualitas Hidup Masyarakat;
- c. Pemerataan Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkualitas;
- d. Peningkatan Keunggulan di Bidang Maritim;
- e. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan.

Sedangkan sasaran pembangunan Provinsi Kepulauan Riau 2021 adalah:

- a. Pertumbuhan ekonomi  $5 \pm 1$  %
- b. Laju inflasi :  $3,5 \pm 1$  %



- c. Indeks gini :  $0,34 \pm 0,01\%$
- d. Persentase penduduk miskin : 5,68%
- e. Indeks pembangunan manusia (IPM) : 75,19

Tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi disusun berdasarkan pengembangan wilayah masing-masing kab/kota di Provinsi Kepulauan Riau. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB mendukung prioritas RKPD 2021 pada point Peningkatan Pendapatan dan Kualitas Hidup Masyarakat.

Dari Rancangan Awal yang sudah ditetapkan diatas telah dilakukan beberapa proses perencanaan, antara lain :

1. Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melibatkan Barenlitbang dan OPD yang bersangkutan baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota
2. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Provinsi Kepulauan Riau, disamping melibatkan Barenlitbang dan OPD yang bersangkutan, juga melibatkan anggota masyarakat seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Wanita, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, akademisi dan Forum Anak yang ada di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Semua proses perencanaan ini harus dilakukan karena pada pelaksanaan Forum OPD akan didapatkan usulan-usulan kegiatan baru diluar Ranwal baik dari dinas maupun Kabupaten/Kota yang berdasarkan hasil analisa perlu dilakukan penambahan kegiatan yang ditetapkan dengan Berita Acara Forum OPD.

Sedangkan pada pelaksanaan Musrenbang perlu dilakukan karena melalui Musrenbang perencanaan awal yang sudah disusun berdasarkan Renstra dan Forum OPD perlu disampaikan kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan dan kemungkinan usulan-usulan baru yang dibutuhkan (analisa kebutuhan). Karena dalam proses perencanaan, setiap kegiatan yang muncul di dalam APBD, harus sudah melalui pembahasan di Musrenbang Tingkat Provinsi Kepulauan Riau.

Setelah melewati semua proses perencanaan, terdapat beberapa perubahan terhadap rancangan awal RKPD, dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2.3 (T-C.30)  
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021  
Provinsi Kepulauan Riau

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB

dalam ribuan

No	Rancangan Awal RKPD 2021					Hasil Analisa Kebutuhan 2021					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
1	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Provinsi Kepri	Tersusunnya dokumen LAKIP	1 Dokumen	125,000	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Provinsi Kepri	Tersusunnya dokumen LAKIP	1 Dokumen	121,469	
2	Penyusunan laporan keuangan	Provinsi Kepri	Tersusunnya Laporan Keuangan	1 Dokumen	25,000	Penyusunan laporan keuangan	Provinsi Kepri	Tersusunnya Laporan Keuangan	1 Dokumen	24,818	
B	Program Pengembangan Data/Informasi					Program Pengembangan Data/Informasi					

3	Verifikasi dan Survey Kegiatan Hibah Kegiatan Sosial	Provinsi Kepri	tersedianya dokumen hasil dari survey dan monitoring terkait kegiatan hibah sosial	1 Dokumen	50,000	Forum Data Pilah Gender dan Anak	Provinsi Kepri	Meningkatnya Keterampilan Forum Data Gender dan Anak	39 Jumlah	150,000	
4	Forum Data Pilah Gender dan Anak	Provinsi Kepri	Meningkatnya Keterampilan Forum Data Gender dan Anak	39 Jumlah	150,000	Pelatihan dan Pendampingan Petugas Pengumpul Data	Provinsi Kepri	Jumlah OPD yang memiliki keterampilan menyusun data terpilah	39 Jumlah	150,000	
5	Pelatihan dan Pendampingan Petugas Pengumpul Data	Provinsi Kepri	Jumlah OPD yang memiliki keterampilan menyusun data terpilah	39 Jumlah	150,000	Program Perencanaan Pembangunan Daerah					
6	Pemetaan Lembaga Peduli Perempuan dan Anak Se Provinsi Kepri	Provinsi Kepri	Jumlah dokumen lembaga peduli perempuan dan anak	1 Dokumen	100,000	Rapat kerja sinkronisasi program	Provinsi Kepri	Jumlah rapat kerja	1 Jumlah	250,000	
C	Program Perencanaan Pembangunan Daerah					Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan urusan PP, PA dan KB (PUG, Anak, PP dan KB)	Provinsi Kepri	Jumlah urusan yang di Monev (PP,PA, PUG dan KB)	1 Dokumen	250,000	
7	Rapat kerja sinkronisasi program	Provinsi Kepri	Jumlah rapat kerja	1 Jumlah	250,000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					

8	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan urusan PP, PA dan KB (PUG, Anak, PP dan KB)	Provinsi Kepri	Jumlah urusan yang di Monev (PP,PA, PUG dan KB)	4 Dokumen	250,000	Penyediaan jasa tenaga pendukung	Provinsi Kepri	Jumlah Tenaga Administrasi Pendukung	12 Bulan	336,000	
9	Evaluasi Program Pemberdayaan Perempuan dan anak tingkat Provinsi Kepri (APE)	Provinsi Kepri	Terlaksananya Penilaian Program PP dan PA di Kab/ Kota	7 Kab/Kota	200,000	Pelaksanaan Kegiatan Rutinitas Perkantoran	Provinsi Kepri	Telaksananya rutinitas perkantoran	12 Bulan	2,744,864	

D	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
10	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Provinsi Kepri	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan	12 Bulan	1,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi Kepri	Tersedianya pengadaan sarana dan prasarana bagi aparatur	12 Bulan	1,070,955	
						Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
						Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Aparatur	Provinsi Kepri	Meningkatnya kapasitas pegawai Dinas P3AP2KB Prov Kepri	10 Orang	100,000	

11	Penyediaan jasa tenaga pendukung	Provinsi Kepri	Jumlah Tenaga Administrasi Pendukung	12 Bulan	652,627	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan					
12	Pelaksanaan Kegiatan Rutinitas Perkantoran	Provinsi Kepri	Telaksananya rutinitas perkantoran	12 Bulan	2,276,653	Facilitasi Pembentukan Kelurahan/Desa Bebas Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Provinsi Kepri	Jumlah Kelurahan/ Desa Bebas Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Percontohan	100 %	250,000	Mendukung Indikator RKP 2021 (Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan)
E	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					Koordinasi Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan TPPO	Provinsi Kepri	Jumlah Pertemuan Koordinasi Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan	2 Kali	300,000	Mendukung Program Prioritas RPJMN 2021 - 2024
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi Kepri	Tersedianya pengadaan sarana dan prasarana bagi aparatur	12 Bulan	1,016,000	Pencatatan dan Pelaporan Data Kekerasan	Provinsi Kepri	Terlaksananya Pencatatan dan Pelaporan Data Kekerasan	1 Dokumen	160,000	Mendukung Indikator RKP 2021 (Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan)
F	Program Peningkatan Disiplin Aparatur					Peningkatan Kapasitas Perempuan bidang ekonomi	Provinsi Kepri	Jumlah Perempuan yang ditingkatkan kapasitasnya bidang ekonomi	50 Orang	600,000	Mendukung Indikator RKP 2021 (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan / TPAK)



14	Pembinaan Mental Pegawai	Provinsi Kepri	Jumlah pegawai yang dibina	51 Orang	125,000	Pembinaan Organisasi Perempuan	Provinsi Kepri	Jumlah organisasi perempuan yang dibina	20 Jumlah	1,000,000	Mendukung Indikator RKP 2021 (Indeks Pemberdayaan Gender / IDG)
G	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					Pemantapan Perlindungan Hak Tenaga Kerja Perempuan, Situasi Khusus dan Kondisi Bencana	Provinsi Kepri	Terlaksananya sosialisasi bagi korban bencana, tenaga kerja dan situasi khusus	50 Orang	550,000	Mendukung Indikator RKP 2021 (Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan)
15	Capacity Building	Provinsi Kepri	Jumlah Aparatur yang mengikuti peningkatan kompetensi penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	51 Orang	100,000	Peningkatan Kualitas Pendidikan Anak Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kepri	Provinsi Kepri	Meningkatnya kualitas pendidikan anak DWP	50 Orang	100,000	
H	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan					Pelatihan Entrepreneurship bagi pelaku usaha perempuan	Provinsi Kepri	Jumlah pelaku usaha perempuan	50 Orang	400,000	Mendukung Indikator RKP 2021 (Indeks Pemberdayaan Gender / IDG)
16	Fasilitasi Pembentukan Kelurahan/Desa Bebas Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Provinsi Kepri	Jumlah Kelurahan/ Desa Bebas Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Percontohan	100 %	250,000	Capacity Building Politik Perempuan di Prov. Kepri	Provinsi Kepri	Jumlah perempuan politik	50 Orang	450,000	Mendukung Indikator RKP 2021 (Indeks Pemberdayaan Gender / IDG)

17	Koordinasi Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan TPPO	Provinsi Kepri	Jumlah Pertemuan Koordinasi Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan	2 Kali	350,000	Koordinasi dan Pemantapan Implementasi SPPT-PPKTP	Provinsi Kepri	Jumlah koordinasi manajemen kasus	3 Kali	1,300,000	Mendukung Sasaran Strategis Kemen PPPA (Meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan termasuk TPPO)
18	Pencatatan dan Pelaporan Data Kekerasan	Provinsi Kepri	Terlaksananya Pencatatan dan Pelaporan Data Kekerasan	1 Dokumen	200,000	Pelayanan UPTD P2TP2A Provinsi Kepri	Provinsi Kepri	Pemenuhan kebutuhan pelayanan UPTD P2TP2A	100 %	2,300,000	Mendukung Indikator RKP 2021 Indeks Perlindungan Khusus Anak
19	Peningkatan Kapasitas Perempuan bidang ekonomi	Provinsi Kepri	Jumlah Perempuan yang ditingkatkan kapasitasnya bidang ekonomi	50 Orang	200,000	Pelayanan Penerimaan Pengaduan dan Penjangkauan Perempuan dan Anak Korban kekerasan	Provinsi Kepri	Persentase pengaduan kekerasan yang ditindaklanjuti	100 %	500,000	Mendukung Sasaran Strategis Kemen PPPA (Meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan termasuk TPPO)
20	Sosialisasi Program Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak (Jelajah Three Ends) Tingkat Provinsi Kepri	Provinsi Kepri	Meningkatnya pemahaman masyarakat terkait perlindungan perempuan dan anak	100 Orang	150,000						

21	Pembinaan Organisasi Perempuan	Provinsi Kepri	Jumlah organisasi perempuan yang dibangun	20 Jumlah	200,000	Pelayanan Rehabilitasi, Pemulangan dan Reintegrasi Perempuan dan anak korban kekerasan	Provinsi Kepri	Persentase jumlah korban yang direhabilitasi dan dipulangkan ke daerah asal	100 %	776,000	Mendukung Indikator RKP 2021 Persentase Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan
22	Sosialisasi Perda Perlindungan Hak Perempuan	Provinsi Kepri	Meningkatnya pemahaman masyarakat terkait perlindungan perempuan dan anak	1 Paket	250,000	Penyediaan Shelter UPTD P2TP2A Provinsi Kepulauan Riau dan sarana prasarana di Kota Batam	Batam	Tersedianya Shelter UPTD P2TP2A dan sarana prasarana di Kota Batam	1 Kegiatan	800,000	Mendukung Indikator RKP 2021 Persentase Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan
23	Pemantapan Perlindungan Hak Tenaga Kerja Perempuan, Situasi Khusus dan Kondisi Bencana	Provinsi Kepri	Terlaksananya sosialisasi bagi korban bencana, tenaga kerja dan situasi khusus	50 Orang	250,000	Penguatan dan pengembangan kapasitas Dharma Wanita Persatuan prov kepri	Provinsi Kepri	Jumlah Anggota DWP yang ditingkatkan kapasitasnya	50 Orang	100,000	
24	Peningkatan Kualitas Pendidikan Anak Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kepri	Provinsi Kepri	Meningkatnya kualitas pendidikan anak DWP	50 Orang	100,000	Seminar ketahanan keluarga anggota Dharma Wanita Persatuan	Provinsi Kepri	Jumlah anggota DWP yang ditingkatkan kapasitasnya	50 Orang	111,000	
25	Pelatihan Entrepreneurship bagi pelaku usaha perempuan	Provinsi Kepri	Jumlah pelaku usaha perempuan	50 Orang	200,000	Pemantapan Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan	Provinsi Kepri	Terlaksananya pemantapan dan perlindungan terhadap perempuan dalam ketenagakerjaan	50 Orang	175,000	Mendukung Indikator RKP 2021 (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan / TPAK)

						Sosialisasi dan Publikasi Perlindungan Perempuan dan Anak di Provinsi Kepri	Provinsi Kepri	Meningkatnya pemahaman masyarakat terkait perlindungan perempuan dan anak	1 Kegiatan	134,000	
26	Capacity Building Politik Perempuan di Prov. Kepri	Provinsi Kepri	Jumlah perempuan politik	50 Orang	200,000	Pembinaan dan Pengembangan RUMAH TERAMPIL Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Provinsi Kepri	Provinsi Kepri	Meningkatnya Kontribusi Perempuan dalam Pendapatan	12 Bulan	420,000	Diluar Renstra dan Mendukung Indikator RKP 2021 Indeks Pemberdayaan Gender
27	Lokakarya Pengembangan Politik Perempuan di Provinsi Kepri	Provinsi Kepri	Meningkatnya partisipasi perempuan di provinsi Kepri	30 %	130,000	Pengembangan Industri Rumahan bagi Pelaku Usaha Perempuan Provinsi Kepri	Provinsi Kepri	Meningkatnya Pelaku Usaha Industri Rumahan	150 Orang	250,000	Diluar Renstra dan Mendukung Indikator RKP 2021 Indeks Pemberdayaan Gender / IDG
28	Pengembangan dan Pemanapan Jejaring pelayanan dan perlindungan perempuan	Provinsi Kepri	Jumlah pemanapan jejaring pelayanan dan perlindungan perempuan	2 Kali	250,000	Pelatihan Life Skill bagi Perempuan di Provinsi Kepri	Provinsi Kepri	Meningkatnya Kontribusi Perempuan dalam Pendapatan	50 Orang	1,200,000	Diluar Renstra dan Mendukung Indikator RKP 2021 Indeks Pemberdayaan Gender
29	Koordinasi dan Pemanapan Implementasi SPPT-PPKTP	Provinsi Kepri	Jumlah rakor implementasi SPPT-PPKTP	2 Kali	280,000	Pelatihan membatik bagi perempuan di Provinsi Kepri	Batam, Bintan	Meningkatnya Kontribusi Perempuan dalam Pendapatan	100 Orang	400,000	Diluar Renstra dan Mendukung Indikator RKP 2021 Indeks Pemberdayaan Gender

30	Pembentukan dan sosialisasi Pergub implementasi Perda Perlindungan Hak Perempuan	Provinsi Kepri	Meningkatnya upaya perlindungan perempuan	1 Paket	280,000	Kampanye Stop Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Tanjungpinang	Terlaksananya kampanye Stop Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	200 Orang	100,000	Diluar Renstra dan Mendukung Indikator Nasional
31	Pelayanan UPTD P2TP2A Provinsi Kepri	Provinsi Kepri	Pemenuhan kebutuhan pelayanan UPTD P2TP2A	100 %	1,400,000	Pembentukan Sekolah Perempuan	Tanjungpinang	Terbentuknya Sekolah Perempuan	1 Kab/Kota	250,000	Diluar Renstra dan Mendukung Indikator Nasional
32	Pelayanan Penerimaan Pengaduan dan Penjangkauan Perempuan dan Anak Korban kekerasan	Provinsi Kepri	Persentase pengaduan kekerasan yang ditindaklanjuti	100 %	195,735	Sosialisasi Penguatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan (He For She) Tingkat Prov. Kepri	Provinsi Kepri	Meningkatnya pemahaman masyarakat terkait perlindungan perempuan dan anak	150 Orang	100,000	
33	Renovasi Kantor UPTD P2TP2A Provinsi Kepri	Provinsi Kepri	Terlaksananya renovasi kantor UPTD	100 %	190,000	Program Peningkatan Kualitas Keluarga					
34	Pelayanan Rehabilitasi, Pemulangan dan Reintegrasi Perempuan dan anak korban kekerasan	Provinsi Kepri	Persentase jumlah korban yang direhabilitasi dan dipulangkan ke daerah asal	100 %	200,000	Pengembangan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga	Provinsi Kepri	Jumlah perempuan terlatih untuk peningkatan kesejahteraan keluarga	100 Orang	570,000	


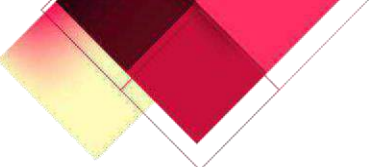


35	Pelatihan Keterampilan bagi anggota Dharma Wanita Persatuan prov kepri	Provinsi Kepri	Jumlah anggota DWP yang ditingkatkan kapasitasnya	50 Orang	150,000	Peningkatan Ketahanan dan Kualitas Keluarga	Provinsi Kepri	Jumlah orang terlatih untuk peningkatan ketahanan dan kualitas keluarga	150 Orang	150,000	Diluar Renstra dan Mendukung Program Prioritas RPJMN 2021-2024
36	Penguatan dan pengembangan kapasitas Dharma Wanita Persatuan prov kepri	Provinsi Kepri	Jumlah Anggota DWP yang ditingkatkan kapasitasnya	50 Orang	100,000	Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK R)	Provinsi Kepri	Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapatkan pembinaan Genre	35 Orang	150,000	Mendukung Indikator RKP 2021 (Angka kelahiran TFR per WUS usia 15 - 49 Th)
37	Seminar ketahanan keluarga anggota Dharma Wanita Persatuan	Provinsi Kepri	Jumlah anggota DWP yang ditingkatkan kapasitasnya	50 Orang	111,000	Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Provinsi Kepri	Jumlah perempuan terlatih	30 Orang	200,000	Diluar Renstra dan Mendukung Indikator Nasional
38	Pemantapan Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan	Provinsi Kepri	Terlaksananya pemantapan dan perlindungan terhadap perempuan dalam ketenagakerjaan	50 Orang	250,000	Program Keluarga Berencana					
39	Sosialisasi Penguatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan (He For She) Tingkat Prov. Kepri	Provinsi Kepri	Meningkatnya pemahaman masyarakat terkait perlindungan perempuan dan anak	150 Orang	150,000	Pemantapan dan Pembinaan BKB, BKL, BKR (Tri Bina)	Provinsi Kepri	Terwujudnya keluarga yang berkualitas	30 Orang	278,000	

I	Program Peningkatan Kualitas Keluarga					Sosialisasi dan Advokasi, KIE tentang Pengendalian Penduduk dan KB di Prov. Kepri	Provinsi Kepri	Meningkatnya pengetahuan pasangan usia subur	100 Orang	300,000	Mendukung Indikator RKP 2021 (Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)
40	Pengembangan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga	Provinsi Kepri	Jumlah perempuan terlatih untuk peningkatan kesejahteraan keluarga	100 Orang	593,265	Pengembangan dan Pembentukan Program Kampung KB Terintegrasi	Provinsi Kepri	Terbentuknya kampung KB terintegrasi di Provinsi Kepri	1 Kab/Kota	150,000	Mendukung Indikator RKP 2021 (Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) (%))
J	Program Keluarga Berencana					Pengembangan Program KKBP KD Tingkat Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepri	Terlaksananya pengembangan Program KKBP KD Tingkat Provinsi Kepulauan Riau	1 Dokumen	400,000	
41	Pemantapan dan Pembinaan BKB, BKL, BKR (Tri Bina)	Provinsi Kepri	Terwujudnya keluarga yang berkualitas	30 Orang	500,000						
42	Sosialisasi dan Advokasi, KIE tentang Pengendalian Penduduk dan KB di Prov. Kepri	Provinsi Kepri	Meningkatnya pengetahuan pasangan usia subur	100 Orang	450,000	Program Perlindungan Anak					

43	Pengembangan dan Pembentukan Program Kampung KB Terintegrasi	Provinsi Kepri	Terbentuknya kampung KB terintegrasi di Provinsi Kepri	1 Kab/Kota	500,000	Ajang Temu Anak Povinsi Kepri	Provinsi Kepri	Terpenuhinya hak anak untuk berkumpul, berkreasi, berpartisipasi dan bersosialisasi	500 Orang	550,000	
44	Pengembangan Program KKBPKD Tingkat Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepri	Terlaksananya pengembangan Program KKBPKD Tingkat Provinsi Kepulauan Riau	1 Dokumen	400,000	Pengembangan Kota Layak anak (SRA, PRA, Rapat Gugus Tugas)	Provinsi Kepri	Terciptanya lingkungan yang aman dan responsif terhadap anak	3 Kab/Kota	529,000	
L	Program Perlindungan Anak					Penguatan dan Pengembangan PATBM	Provinsi Kepri	Jumlah Peserta Yang Terlatih dalam PATBM	30 Orang	722,000	Mendukung Indikator RKP 2021 Indeks Perlindungan Anak
45	Ajang Temu Anak Povinsi Kepri	Provinsi Kepri	Terpenuhinya hak anak untuk berkumpul, berkreasi, berpartisipasi dan bersosialisasi	500 Orang	550,000	Peningkatan Kapasitas Orangtua dan Anak terhadap pemenuhan dan perlindungan hak anak	Provinsi Kepri	Meningkatnya kapasitas orangtua dan anak terhadap pemenuhan dan perlindungan hak anak	30 Orang	320,000	Mendukung Indikator RKP 2021 Indeks Perlindungan Anak
46	Pengembangan Kota Layak anak (SRA, PRA, Rapat Gugus Tugas)	Provinsi Kepri	Terciptanya lingkungan yang aman dan responsif terhadap anak	3 Kab/Kota	529,000	Pengembangan Pusat Konsultasi Keluarga (PUSPAGA) dan klinik tumbuh kembang anak	Provinsi Kepri	Tersedianya biaya operasional puspaga	12 Bulan	550,000	Mendukung Indikator Persentase Balita yang mendapatkan Pengasuhan Tidak Layak
47	Pengembangan Taman Pengasuhan Anak (TPA)	Provinsi Kepri	Jumlah Anak yang mendapatkan Pembinaan di TPA	30 Orang	600,000	Fasilitasi Pencegahan Perkawinan Anak	Tanjungpinang, Bintan	Jumlah Daerah yang difasilitasi dalam Pencegahan Perkawinan Anak	2 Kab / Kota	150,000	Diluar Renstra dan Mendukung Indikator Nasional

	Percontohan Provinsi Kepri										
48	Penguatan dan Pengembangan PATBM	Provinsi Kepri	Jumlah Peserta Yang Terlatih dalam PATBM	30 Orang	550,000	Musrenbang Forum Anak Provinsi dan Kabupaten/Kota	Provinsi Kepri	Jumlah Rapat Musrenbang	1 kali	135,000	
49	Penguatan dan Pengembangan KPPAD	Provinsi Kepri	Terlaksananya Perlindungan Anak dari Kekerasan di Provinsi Kepri	12 Bulan	1,500,000	Pelatihan KHA untuk tenaga Pendidik dan Kependidikan Tingkat SMA	Provinsi Kepri	Terlaksananya Pelatihan KHA untuk tenaga Pendidik dan Kependidikan Tingkat SMA	2 Kali	250,000	Diluar Renstra dan Mendukung Indikator Nasional
50	Peningkatan Kapasitas Orangtua dan Anak terhadap pemenuhan dan perlindungan hak anak	Provinsi Kepri	Meningkatnya kapasitas orangtua dan anak terhadap pemenuhan dan perlindungan hak anak	30 Orang	550,000	Fasilitasi Pembentukan APSAI Kabupaten/Kota	Batam, Karimun	Terbentuknya APSAI di Kabupaten/Kota	7 Kab/Kota	200,000	Diluar Renstra dan Mendukung Indikator Nasional
51	TOT bagi toma, toga, mubaligh/ Penceramah dan lembaga pemerhati anak	Provinsi Kepri	Meningkatnya pemahaman toga, toga, mubaligh/ penceramah dan lembaga pemerhati anak terhadap pemenuhan hak anak	30 Orang	500,000	Pelatihan Keterampilan Anak di LPKA	Batam	Persentase Anak yang mendapatkan Keterampilan di LPKA	100%	200,000	Mendukung Indikator RKP 2021 Indeks Perlindungan Khusus Anak
						Pelatihan Kader PATBM di Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepri	Jumlah Kader/Aktifis yang Terlatih dalam PATBM	50 Orang	200,000	Diluar Renstra Mendukung Indikator RKP 2021 Indeks Perlindungan Anak
						Festival Anak Kepulauan Riau	Bintan	Terlaksananya Festival Anak kepulauan Riau	500 Orang	300,000	





52	Pengembangan Pusat Konsultasi Keluarga (PUSPAGA) dan klinik tumbuh kembang anak	Provinsi Kepri	Tersedianya biaya operasional puspaga	12 Bulan	550,000	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak					
----	---	----------------	---------------------------------------	----------	---------	---	--	--	--	--	--

M	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak					Forum Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) Provinsi Kepri	Provinsi Kepri	Jumlah OPD yang melaksanakan PPRG dan PUG	39 Orang	200,000	Mendukung Indikator RKP (Indeks Pembangunan Gender/ IPG)
53	Forum Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) Provinsi Kepri	Provinsi Kepri	Jumlah OPD yang melaksanakan PPRG dan PUG	39 Orang	200,000	Pengembangan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG dan PPRG di Provinsi Kepri	Provinsi Kepri	Jumlah orang yang ditingkatkan kapasitasnya	39 Orang	175,000	Mendukung Indikator RKP (Indeks Pembangunan Gender/ IPG)
54	Pengembangan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG dan PPRG di Provinsi Kepri	Provinsi Kepri	Jumlah orang yang ditingkatkan kapasitasnya	39 Orang	175,000	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PUG dan PPRG di Kab/Kota dan Provinsi Kepri	Provinsi Kepri	Jumlah Kabupaten/ Kota yang melaksanakan PUG dan PPRG	7 Kab/Kota	125,000	Mendukung Indikator RKP (Indeks Pembangunan Gender/ IPG)
55	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PUG dan PPRG di Kab/Kota dan Provinsi Kepri	Provinsi Kepri	Jumlah Kabupaten/ Kota yang melaksanakan PUG dan PPRG	7 Kab/Kota	125,000	Pelatihan TOT PPRG Desa	Provinsi Kepri	Meningkatnya Kapasitas Fasilitator Gender di Kabupaten/Kota dan Provinsi Kepri	7 Kab/Kota	170,000	Diluar Renstra dan Mendukung Indikator RKP (Indeks Pembangunan Gender/ IPG)
TOTAL					20,779,280					25.073.235	

Dari Tabel dapat dilihat beberapa perubahan, antara lain :



- 
1. Terdapatnya rumusan kegiatan baru sebanyak 7 kegiatan yang tidak terdapat dirancangan awal RKPD, dari 55 kegiatan pada Ranwal menjadi 61 kegiatan setelah Musrenbang.
  2. Terdapat perubahan Pagu Anggaran, yang awalnya berjumlah Rp. 20.779.280.000,- (Dua Puluh Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) menjadi berjumlah Rp. 25.073.235.564,- (Dua Puluh Lima Milyar Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Enam Puluh Empat Rupiah).

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kepri dalam Penyusunan program dan kegiatan dengan memperhatikan usulan-usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku yang berkepentingan akan tetapi belum ada usulan dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi dan lain-lainnya.

Tabel 2.4 (T-C.32)

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2021  
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Karimun	Jumlah perempuan terlatih	30 Orang	Usulan Meminta bantuan untuk pelatihan dari segi keterampilan untuk ibu-ibu rumah tangga telah diakomodir dalam Rancangan Akhir
2	Penguatan dan Pengembangan PATBM	Bintan	Jumlah Peserta yang terlatih dalam PATBM	30 Orang	Telah diakomodir dalam Renja 2021
3	Pembentukan Shelter dan Sarana Prasarana UPTD P2TP2A Di Kota Batam	Batam	Tersedianya Shelter UPTD P2TP2A dan sarana prasarana di Kota Batam	1 Kegiatan	Usulan Pembentukan Shelter dan Sarana Prasarana UPTD P2TP2A Di Kota Batam telah diakomodir dalam Rancangan Akhir Renja 2021
4	Pelatihan Life Skill Bagi Perempuan Di Provinsi Kepri	Batam	Meningkatnya Kontribusi Perempuan dalam Pendapatan	260 Orang	Usulan Pelatihan Life Skill Bagi Perempuan Di Provinsi Kepri telah diakomodir dalam Rancangan Akhir Renja

					Usulan Untuk peningkatan ketahanan ekonomi keluarga kurang mampu telah diakomodir dalam Rancangan Akhir Renja 2021
5	Pelatihan Kader PATBM di Provinsi Kepulauan Riau	Batam	Jumlah Kader/Aktivis yang Terlatih dalam PATBM	50 Orang	Usulan Peningkatan Kader PATBM telah terakomodir dalam Musrenbang RKPD 2021
6	Pelatihan membuat batik bagi perempuan di Provinsi Kepri	Batam, Bintan	Meningkatnya Kontribusi Perempuan dalam Pendapatan	150 Orang	<p>Pelatihan Membuat Batik Untuk Masyarakat Kecamatan Nongsa, Sei. beduk, Galang dan Bulang telah diakomodir dalam Musrenbang RKPD 2021</p> <p>Pelatihan Enterpreunership Perempuan (Batik) telah diakomodir dalam Musrenbang RKPD 2021</p>
7	Peningkatan Kapasitas Perempuan bidang ekonomi	Batam	Jumlah perempuan yang ditingkatkan kapasitasnya bidang ekonomi	100 Orang	<p>Pelatihan perempuan tangguh dan mandiri dalam ekonomi menompang penghasilan suami telah diakomodir dalam Renja 2021</p> <p>Untuk Perempuan dan Ibu Rumah Tangga telah diakomodir dalam Renja 2021</p>
8	Festival Anak Kepulauan Riau	Bintan	Terlaksananya Festival Anak kepulauan Riau	500 Orang	Festival Anak Kepulauan Riau telah diakomodir dalam Musrenbang RKPD 2021
9	Pengembangan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga	Bintan	Jumlah perempuan terlatih untuk peningkatan kesejahteraan keluarga	100 Orang	Keluarga Sejahtera di Kabupaten Bintan telah diakomodir dalam Renja 2021

10	Koordinasi Dan Pemantapan implentasi SPPT- PPKTP Se-Provinsi Kepulauan Riau	Batam	Jumlah Rakor implementasi SPPTPPKTP	4 Kali	Koordinasi Dan Pemantapan implentasi SPPT- PPKTP Se-Provinsi Kepulauan Riau telah diakomodir dalam Renja 2021
					Workshop Tanpa Kekerasan Untuk Perempuan dan Anak di Kota Batam telah diakomodir dalam Renja 2021
11	Pelayanan UPTD P2TP2A Provinsi Kepri	Tanjungpinang, Batam	Pemenuhan kebutuhan pelayanan UPTD P2TP2A	100%	Worshop Pembentukan Forum RT/RW Dalam Pencegahan Tindakan Kekerasan terhadap perempuan dan Anak SeKepri telah diakomodir dalam Renja 2021
12	Pelayanan Penerimaan Pengaduan dan Penjangkauan Perempuan dan Anak Korban kekerasan	Tanjungpinang, Batam	Persentase pengaduan kekerasan yang ditindaklanjuti	100%	Sosialisasi Pembentukan Forum Masyarakat Peduli KDRT dan TPPO di kota Batam telah diakomodir dalam Renja 2021
13	Pelayanan Rehabilitasi, Pemulangan dan Reintegrasi Perempuan dan anak korban kekerasan	Tanjungpinang, Batam	Persentase jumlah korban yang direhabilitasi dan dipulangkan ke daerah asal	100%	Bimtek Manajemen Kasus Bagi SDM Dalam Senergi untuk tindakan kekerasan terhadap perempuan dan Anak SeProvinsi Kepulauan Riau telah diakomodir dalam Renja 2021
14	Capacity Building Politik Provinsi Kepri	Batam	jumlah perempuan politik	50 Orang	Capacity Building Politik Provinsi Kepri telah diakomodir dalam Renja 2021
15	Pelatihan Enterpreneurship bagi pelaku usaha perempuan	Untuk Batam	Jumlah pelaku usaha perempuan	50 Orang	Tata Boga telah diakomodir dalam Rancangan Awal RKPD 2021
16	Penataan Taman Gedung Wanita Raja Sahila	Tanjungpinang	Tersedianya Taman Gedung Wanita Raja Sahila	1 Kegiatan	Penataan Taman Gedung Wanita Raja Sahila telah diakomodir melalui Musrenbang RKPD 2021

17	Pemantapan Perlindungan Hak Tenaga Kerja Perempuan, Situasi Khusus dan Kondisi Bencana	Batam	Terlaksananya sosialisasi bagi korban bencana, tenaga kerja dan situasi khusus	50 Orang	Sosialisasi Pembentukan RP3 Bagi pekerja Perempuan di Batam telah diakomodir dalam Renja 2021
----	--	-------	--	----------	---

Dar I table diatas terdapat 7 (Tujuh) usulan tambahan dari Hasil Musrenbang antara lain:

1. Usulan Meminta bantuan untuk pelatihan dari segi keterampilan untuk ibuibu rumah tangga.
2. Usulan Pembentukan Shelter dan Sarana Prasarana UPTD P2TP2A Di Kota Batam
3. Usulan Pelatihan Life Skill Bagi Perempuan Di Provinsi Kepri untuk peningkatan ketahanan ekonomi bagi keluarga tidak mampu.
4. Usulan Peningkatan Kader PATBM melalui pelatihan kader PATBM dalam rangka peningkatan pemberian perlindungan kepada anak yang bermasis masyarakat.
5. Usulan Pelatihan Membatik Untuk Masyarakat Kecamatan Nongsa, Sei.beduk, Galang dan Bulang.
6. Usulan Festival Anak Kepulauan Riau.
7. Usulan Penataan Taman Gedung Wanita Raja Sahila.


## Tujuan dan Sasaran

# 3 Tujuan dan Sasaran

### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai arahan menurut Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Pemerintah telah menetapkan pengaturan mengenai perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Pada saat itu, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan sudah masuk ke dalam kelompok negara-negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income countries) yang memiliki infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.





Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.


RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan Sustainable Development Goals (SDGs). Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan, yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepri memiliki kontribusi terhadap agenda pembangunan nasional 2021-2024, yaitu pada agenda ke- 3 yakni Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, sub agenda prioritas yang diacu oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepri yakni Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda.

Adapun strategi dan kebijakan yang dapat diacu oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepri dalam mencapai sasaran RPJMN 2021-2024 yang telah diamanatkan dalam Perpres 18 Tahun 2020 antara lain:

- A. Perwujudan Indonesia Layak Anak melalui penguatan Sistem Perlindungan Anak yang responsif terhadap keragaman dan karakteristik wilayah anak untuk memastikan anak menikmati haknya, mencakup: a) penguatan regulasi dan penegakkan hukum yang proporsional terhadap kepentingan terbaik anak; b) penguatan efektivitas kelembagaan melalui peningkatan kapasitas SDM, penyedia layanan, koordinasi, sistem data dan informasi, serta fungsi pembinaan dan pengawasan; c) peningkatan pemahaman tentang perlindungan anak bagi para pemangku kepentingan, masyarakat, keluarga, dan anak; d) penguatan jejaring antara pemerintah dengan komunitas, media massa, dunia usaha, dan lembaga masyarakat; e) peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan sesuai dengan tingkat kematangan usianya; f) penguatan upaya pencegahan dan penanganan berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, termasuk isu pekerja anak, dan penelantaran pada anak; g) penguatan koordinasi dan sinergi upaya pencegahan perkawinan anak dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan; h) penguatan pengasuhan di lingkungan keluarga dan pengasuhan sementara di institusi lainnya; i) peningkatan akses layanan dasar yang terpadu, ramah dan inklusif bagi seluruh anak terutama bagi anak yang berada pada situasi dan kondisi khusus, dan j) peningkatan layanan dan rehabilitasi bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus.
- B. Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, mencakup: (a) penguatan kebijakan dan regulasi, (b) percepatan pelaksanaan PUG di kementerian/ lembaga, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan pemerintah desa melalui penguatan pelembagaan PUG dan penguatan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG), (c) peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu baik perempuan maupun laki-laki, keluarga, komunitas, lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha; d) peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, terutama dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, tenaga kerja, serta politik, jabatan publik, dan pengambilan keputusan; dan e) peningkatan jejaring dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, media massa, dunia usaha, dan lembaga masyarakat.
- C. Peningkatan perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran dari kekerasan dan TPPO, mencakup: a) penguatan kebijakan dan regulasi pencegahan, penanganan, rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi; b) peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu baik perempuan maupun laki-laki, keluarga, masyarakat, dunia



usaha, dan pemangku kepentingan lainnya tentang KtP dan TPPO; c) peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan penyelenggara pemerintahan tentang KtP dan TPPO; d) penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan melalui peningkatan kapasitas SDM penyedia layanan, koordinasi antarunit penyedia layanan, penguatan data dan informasi, serta pengawasan; e) pengembangan sistem data terpadu KtP dan TPPO; f) pengembangan sistem layanan terpadu penanganan KtP dan TPPO; g) penguatan jejaring dan kerja sama antara pemerintah (pusat dan daerah), komunitas, media massa, dunia usaha dan lembaga bantuan hukum; dan h) pengembangan inovasi dalam upaya pencegahan KtP dan TPPO.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Rencana kerja (Renja) merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis yang telah disusun. Di dalam rencana kerja, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kepri mendefinisikan seluruh tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang akan diimplementasikan dalam satu tahun dan dituangkan dalam dokumen rencana kerja. Pada dokumen rencana kerja dijabarkan dan ditetapkan target kinerja tahunan. Target kinerja ini akan menjadi komitmen untuk mencapainya dalam satu tahun, dan merupakan tolok ukur bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Adapun tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kepri Tahun 2021 adalah sebagai berikut : a. Tujuan

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kepri mempunyai tujuan jangka menengah antara lain :

1. Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur sesuai tugas pokok fungsi SKPD.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana perkantoran dan perbekalan sebagai penunjang dalam Operasional Pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi.
3. Meningkatkan ketersediaan data sebagai basis penyusunan perencanaan responsive gender dan anak.
4. Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak.
5. Mewujudkan pembangunan yang berkesetaraan dan berkeadilan gender.
6. Meningkatkan pelayanan KB bagi masyarakat dengan sasaran meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR) dan menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need).

7. Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan hak perempuan.

b. Sasaran

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kepri mempunyai sasaran jangka menengah yaitu :

1. Meningkatnya capaian kinerja SKPD.
2. Meningkatnya kualitas layanan penunjang dalam operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
3. Tersedianya data yang berkualitas dalam sistem data gender dan anak.
4. Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak.
5. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan
6. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam ber-KB
7. Mewujudkan perlindungan hak perempuan dari tindak kekerasan.

Table. 3.1.

TUJUAN DAN SASARAN

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN AWAL	TARGET 2021
Meningkatkan Kompetensi SDM Aparatur sesuai tugas pokok fungsi dengan sasaran meningkatnya capaian kinerja DP3AP2KB	Meningkatnya Capaian Kinerja SKPD	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tersusun	2	2
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkantoran dan perbekalan sebagai penunjang dalam operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan penunjang	Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang dalam Operasional Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	12	12
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	12	12

Meningkatkan ketersediaan data sebagai basis penyusunan perencanaan responsif gender dan anak dengan sasaran tersedianya data yang berkualitas dalam sistem gender dan anak	Tersedianya data yang berkualitas dalam sistem data gender dan anak	Program Pengembangan Data/Informasi	Data / Informasi dan aplikasi sistem informasi terkelola dengan baik	12	12
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	3	2
Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Program Perlindungan Anak	Rasio Kekerasan Terhadap Anak	4,28	3.66
			Persentase Kabupaten/Kota yang Melaksanakan KLA dengan Pencapaian Peringkat Pratama	28,57	85.71
Mewujudkan pembangunan yang berkesetaraan dan berkeadilan gender	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Terhadap Belanja Langsung APBD Provinsi	4,10	7
Meningkatkan pelayanan KB bagi masyarakat dengan sasaran meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR) dan menurunnya kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam ber KB	Program keluarga berencana	Pembentukan Kampung KB	0	1
			Persentase Penggunaan Alat-Alat Kontrasepsi (CPR)	46.20	50.73
Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan hak perempuan	Mewujudkan Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak kekerasan	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPPO	33,19	28.49
			Persentase Peningkatan Kontribusi Perempuan Dalam Pendapatan	100	100
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Perempuan (keluarga miskin) yang mendapatkan peningkatan kapasitas lifeskill	0.44	1.48

## Bab

# Program dan Kegiatan 4 Program dan Kegiatan



#### 4.1 Program dan Kegiatan

Dalam mencapai sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kepri telah menyusun program dan Kegiatan pada Tahun Anggaran 2021 berdasarkan hasil Analisa kebutuhan sesuai dengan Perpres 33 Tahun 2019 Tentang Standart Harga Satuan Regional adalah sebesar Rp. 25.073.235.574,00,- dengan perincian kegiatan sebagai berikut :

- A. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  - 1) Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
  - 2) Penyusunan laporan keuangan
- B. Program Pengembangan Data/Informasi
  - 1) Forum Data Pilah Gender dan Anak
  - 2) Pelatihan dan Pendampingan Petugas Pengumpul Data
- C. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
  - 1) Rapat kerja sinkronisasi program
  - 2) Monitoring dan Evaluasi Peyelenggaraan urusan PP, PA dan KB (PUG, Anak, PP dan KB)
  - 3) Penyusunan Renstra OPD
- D. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - 1) Penyediaan jasa tenaga pendukung
  - 2) Pelaksanaan Kegiatan Rutinitas Perkantoran
- E. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 2) Penataan Taman Gedung Wanita Raja Sahila
- F. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  - 1) Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Aparatur
- G. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
  - 1) Fasilitasi Pembentukan Kelurahan/Desa Bebas Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
  - 2) Koordinasi Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan TPPO
  - 3) Pencatatan dan Pelaporan Data Kekerasan
  - 4) Peningkatan Kapasitas Perempuan bidang ekonomi
  - 5) Pembinaan Organisasi Perempuan
  - 6) Sosialisasi dan Publikasi Perlindungan Perempuan dan Anak



- 7) Pemantapan Perlindungan Hak Tenaga Kerja Perempuan, Situasi Khusus dan Kondisi Bencana
- 8) Peningkatan Kualitas Pendidikan Anak Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kepri
- 9) Pelatihan Entrepreneurship bagi pelaku usaha perempuan
- 10) Capacity Building Politik Perempuan di Prov. Kepri
- 11) Koordinasi dan Pemantapan Implementasi SPPT-PPKTP
- 12) Pelayanan UPTD P2TP2A Provinsi Kepri
- 13) Pelayanan Penerimaan Pengaduan dan Penjangkauan Perempuan dan Anak Korban kekerasan
- 14) Pelayanan Rehabilitasi, Pemulangan dan Reintegrasi Perempuan dan anak korban kekerasan
- 15) Penyediaan Shelter UPTD P2TP2A Provinsi Kepri dan sarana prasarana di Kota Batam
- 16) penguatan dan pengembangan kapasitas Dharma Wanita Persatuan prov kepri
- 17) Seminar ketahanan keluarga anggota Dharma Wanita Persatuan
- 18) Pemantapan Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan
- 19) Sosialisasi Penguatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan (He For She) Tingkat Prov. Kepri
- 20) Pembinaan dan Pengembangan RUMAH TERAMPIL Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Provinsi Kepri
- 21) Pengembangan Industri Rumahan bagi Pelaku Usaha Perempuan Provinsi Kepri
- 22) Pelatihan Life Skill bagi Perempuan di Provinsi Kepri
- 23) Pelatihan Membatik bagi Perempuan di Provinsi Kepri
- 24) Kampanye Stop Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak 25) Pembentukan Sekolah Perempuan

#### H. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

- 1) Pengembangan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga
- 2) Peningkatan Ketahanan dan Kualitas Keluarga
- 3) Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK – R)
- 4) Penguatan Pemberdayaan Ekonomi keluarga

#### I. Program Keluarga Berencana

- 1) Pemantapan dan Pembinaan BKB, BKL, BKR (Tri Bina)
- 2) Sosialisasi dan Advokasi, KIE tentang Pengendalian Penduduk dan KB di Prov. Kepri

- 3) Pengembangan dan Pembentukan Program Kampung KB Terintegrasi
- 4) Pengembangan Program KKBPKD Tingkat Provinsi Kepulauan Riau

J. Program Perlindungan Anak

- 1) Ajang Temu Anak Provinsi Kepri
- 2) Pengembangan Kota Layak anak (SRA, PRA, Rapat Gugus Tugas)
- 3) Penguatan dan Pengembangan PATBM
- 4) Peningkatan Kapasitas Orangtua dan Anak terhadap pemenuhan dan perlindungan hak anak
- 5) Pengembangan Pusat Konsultasi Keluarga (PUSPAGA) dan klinik tumbuh kembang anak
- 6) Fasilitasi Pencegahan Perkawinan Anak
- 7) Musrenbang Forum Anak Provinsi dan Kabupaten/Kota
- 8) Pelatihan KHA untuk tenaga Pendidik dan Kependidikan tingkat SMA
- 9) Fasilitasi Pembentukan APSAI Kabupaten/Kota
- 10) Pelatihan Keterampilan Anak di LPKA
- 11) Pelatihan Kader PATBM di Provinsi Kepri
- 12) Festival Anak Kepulauan Riau

K. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

- 1) Forum Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) Provinsi Kepri
- 2) Pengembangan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG dan PPRG di Provinsi Kepri
- 3) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PUG dan PPRG di Kab/Kota dan Provinsi Kepri
- 4) Pelatihan TOT PPRG Desa

Selengkapnya Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Th. 2021 dan Prakiraan Maju Th. 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021  
dan Prakiraan Maju Tahun 2022  
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Nama Perangkat Daerah : 2.2.1 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<b>TOTAL BELANJA LANGSUNG</b>				<b>25.073.235.574,00</b>				<b>24.829.237.274,00</b>
2	Urusan Wajib Beken Pelayanan Dasar								
2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				23.090.581.174,00				22.845.582.874,00
2.2.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran		12,00	3.080.731.574,00			0,00	3.080.731.574,00
2.2.1.18	Penyediaan jasa tenaga pendukung	Jumlah Tenaga Administrasi Pendukung	Seluruh Kab/Kota	12,00	335.687.000,00	Pondap- tan Asli Daerah		12,00	335.687.000,00
2.2.1.48	Pelaksanaan Kegiatan Rutinitas Perkantoran	Terselenggaranya Kegiatan Rutinitas Perkantoran	Seluruh Kab/Kota	12,00	2.744.864.574,00	Pondap- tan Asli Daerah		12,00	2.744.864.574,00
2.2.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur		12,00	1.070.965.700,00			0,00	1.070.965.700,00
2.2.2.59	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan sarana dan prasarana bagi aparatur	Seluruh Kab/Kota	12,00	1.070.965.700,00	Pondap- tan Asli Daerah		12,00	1.070.965.700,00
2.2.2.992	Penataan Taman Gedung Wanita Raja Sahila	Tersedianya Taman Gedung Wanita Raja Sahila	Kecamatan Bukit Bestari	1,00	205.000.000,00	Pondap- tan Asli Daerah		1,00	205.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.2.83	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap Perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)		29,40	12.710.000,700,00			0,00	12.710.000,700,00
		Rasio Perempuan Korban Kekerasan		100,00				0,00	
2.2.83.1	Facilitasi Pembentukan Kelurahan/Desa Bebas Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Jumlah Kelurahan / Desa bebas kekerasan terhadap perempuan dan anak percontohan	Sekeloa Kab/Kota	100,00	240.008.200,00	Pendapatan Asli Daerah		100,00	240.008.200,00
2.2.83.6	Koordinasi Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan TPPO	Jumlah pertemuan koordinasi gugus tugas pencegahan dan penanganan kekerasan	Sekeloa Kab/Kota	2,00	271.842.000,00	Pendapatan Asli Daerah		2,00	271.842.000,00
2.2.83.8	Pencabutan dan Pelaporan Data Kekerasan	Tertaksennya pencabutan dan pelaporan data kekerasan	Sekeloa Kab/Kota	1,00	162.320.300,00	Pendapatan Asli Daerah		1,00	162.320.300,00
2.2.83.10	Peningkatan Kapasitas Perempuan bidang ekonomi	Jumlah perempuan yang ditingkatkan kapasitasnya bidang ekonomi	Kelurahan Batu Ia	150,00	600.027.200,00	Pendapatan Asli Daerah		150,00	600.027.200,00
2.2.83.19	Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah Organisasi Perempuan yang dibina	Sekeloa Kab/Kota	20,00	999.891.320,00	Pendapatan Asli Daerah		20,00	999.891.320,00
2.2.83.27	Sosialisasi dan Publikasi Perlindungan Perempuan dan Anak	Meningkatnya pemahaman masyarakat terkait perlindungan perempuan dan anak	Sekeloa Kab/Kota	1,00	176.228.850,00			1,00	176.228.850,00
2.2.83.32	Pemantapan Perlindungan Hak Tenaga Kerja Perempuan, Situasi Khusus dan Kondisi Bencana	Tertaksennya sosialisasi bagi korban bencana, tenaga kerja dan situasi khusus	Sekeloa Kab/Kota	200,00	540.550.100,00	Pendapatan Asli Daerah		200,00	540.550.100,00
2.2.83.38	Peningkatan Kualitas Pendidikan Anak Disabilitas Wanita Pesisiran Provinsi Kepri	Meningkatnya kualitas pendidikan anak DWP	Sekeloa Kab/Kota	50,00	106.385.600,00	Pendapatan Asli Daerah		50,00	106.385.600,00



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.2.83.37	Pelatihan Entrepreneurship bagi pelaku usaha perempuan	Jumlah pelaku usaha perempuan	Kota Batam/Kota Tanjungpinang	50.00	397.438.500,00	Pendapatan Asli Daerah		50.00	397.438.500,00
2.2.83.38	Capacity Buiding Politik Perempuan di Prov. Kepri	Jumlah perempuan politik	Seluruh Kab/Kota	50.00	425.005.250,00	Pendapatan Asli Daerah		50.00	425.005.250,00
2.2.83.44	Koordinasi dan Pemantapan Implementasi SPPT-PPKTP	Jumlah Rakor implementasi SPPT-PPKTP	Kota Batam/Kota Tanjungpinang	2.00	1.275.500.000,00	Pendapatan Asli Daerah		2.00	1.275.500.000,00
2.2.83.47	Pelayanan UPTD P2TP2A Provinsi Kepri	Pemenuhan kebutuhan pelayanan UPTD P2TP2A	Seluruh Kab/Kota	100.00	2.310.144.350,00	Pendapatan Asli Daerah		100.00	2.310.144.350,00
2.2.83.48	Pelayanan Penerimaan Pengaduan dan Penjangkauan Perempuan dan Anak Korban kekerasan	Persentase pengaduan kekerasan yang ditindaklanjuti	Seluruh Kab/Kota	100.00	498.708.950,00	Pendapatan Asli Daerah		100.00	498.708.950,00
2.2.83.50	Pelayanan Rehabilitasi, Pemulangan dan Reintegrasi Perempuan dan anak korban kekerasan	Persentase jumlah korban yang direhabilitasi dan dipulangkan ke daerah asal	Seluruh Kab/Kota	100.00	775.160.900,00	Pendapatan Asli Daerah		100.00	775.160.900,00
2.2.83.54	penguatan dan pengembangan kapasitas Dharma Wanita Persatuan prov kepri	Jumlah Anggota DWP yang ditingkatkan kapasitasnya	Seluruh Kab/Kota	50.00	105.935.600,00	Pendapatan Asli Daerah		50.00	105.935.600,00
2.2.83.56	Seminar ketahanan keluarga anggota Dharma Wanita Persatuan	Jumlah Anggota DWP yang ditingkatkan kapasitasnya	Seluruh Kab/Kota	50.00	109.335.600,00	Pendapatan Asli Daerah		50.00	109.335.600,00
2.2.83.57	Pemantapan Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan	Tersaksunya pemantapan dan perlindungan terhadap perempuan dalam ketenagakerjaan	Seluruh Kab/Kota	50.00	175.249.900,00	Pendapatan Asli Daerah		50.00	175.249.900,00



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (tahun rencana)				Catatan Penting	Proyeksi Meja Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.2.63.55	Solusiasi Pengujian Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan (Ho. Poi. Shie) Tingkat Prov. Kepri	Meningkatnya pemahaman masyarakat terkait perlindungan perempuan dan anak	Seluruh Kab/Kota	150,00	134.179.200,00	Pendapatan Asli Daerah		150,00	134.179.200,00
2.2.63.57	Pembinaan dan Pengembangan RUMAH TERAMPIL Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Prov. Kepri	Meningkatnya Kontribusi Perempuan dalam Pendapatan	Seluruh Kab/Kota	12,00	405.750.000,00			12,00	405.750.000,00
2.2.63.66	Pengembangan Industri Rumah Tangga bagi Pelaku Usaha Perempuan Provinsi Kepri	Meningkatnya Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga	Seluruh Kab/Kota	150,00	247.000.000,00			150,00	247.000.000,00
2.2.63.68	Pelatihan Life Skill bagi Perempuan di Provinsi Kepri	Meningkatnya Kontribusi Perempuan dalam Pendapatan	Kecamatan Nongsa	200,00	1.200.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah		200,00	1.200.000.000,00
2.2.63.70	Kampanye Stop Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Terlaksananya kampanye Stop Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Kelurahan Tanjung Pinang Kota	200,00	102.341.100,00			200,00	102.341.100,00
2.2.63.71	Pembentukan Sekolah Perempuan	Terbentuknya Sekolah Perempuan	Seluruh Kab/Kota	1,00	249.998.840,00			1,00	249.998.840,00
2.2.63.72	Pelatihan membakal bagi perempuan di Provinsi Kepri	Meningkatnya Kontribusi Perempuan dalam Pendapatan	Kecamatan Batu Aji	120,00	400.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah		120,00	400.000.000,00
2.2.63.73	Pembentukan Shelter dan Sarana Prasarana UPTD P2TP2A di Kota Batam	Tersedianya Shelter UPTD P2TP2A dan sarana prasarana di Kota Batam	Kecamatan Batam Kota	1,00	800.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah		1,00	800.000.000,00
2.2.64	Program Perlindungan Anak	Rasio Kekerasan terhadap Anak		3,60	4.020.264.250,00			0,00	4.020.264.250,00
		Persentase Kab/Kota yang melaksanakan KLA dengan pencapaian Peringkat Pratama		85,79				0,00	
2.2.64.3	Ajang Temu Anak Provinsi Kepri	Terpeertunya hak anak untuk berkumpul, berkreasi, berpartisipasi dan bersosialisasi	Seluruh Kab/Kota	500,00	549.889.400,00	Pendapatan Asli Daerah		500,00	549.889.400,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.2.84.8	Penguatan dan Pengembangan PATBM	Jumlah Peserta yang terlatih dalam PATBM	Seluruh Kab/Kota	150.00	722.662.500,00	Pendapatan Asli Daerah		150.00	722.662.500,00
2.2.84.16	Pengembangan Kota Layak anak (SRA, PRA, Rapat Gugus Tugas)	Terciptanya lingkungan yang aman dan responsif terhadap anak	Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna	3.00	526.729.900,00	Pendapatan Asli Daerah		3.00	526.729.900,00
2.2.84.18	Peningkatan Kapasitas Orang tua dan Anak terhadap pemenuhan dan perlindungan hak anak	Meningkatnya kapasitas orang tua dan anak terhadap pemenuhan dan perlindungan hak anak	Seluruh Kab/Kota	30.00	319.341.900,00	Pendapatan Asli Daerah		30.00	319.341.900,00
2.2.84.20	Pengembangan Pusat Konsultasi Keluarga (PUSPAGA) dan klinik tumbuh kembang anak	Tersedianya biaya operasional PUSPAGA	Seluruh Kab/Kota	12.00	501.674.500,00	Pendapatan Asli Daerah		12.00	501.674.500,00
2.2.84.22	Facilitasi Pencapaian Perkawinan Anak	Jumlah Daerah yang difasilitasi dalam Pencapaian Perkawinan Anak	Kecamatan Ben Kualu Lobam, Kelurahan Batu Lintang	2.00	154.886.700,00	Pendapatan Asli Daerah		2.00	154.886.700,00
2.2.84.23	Musrenbang Forum Anak Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Rapat Musrenbang	Seluruh Kab/Kota	2.00	135.000.000,00			2.00	135.000.000,00
2.2.84.24	Pelatihan KHA untuk tenaga Pendidik dan Kependidikan Tingkat SMA	Terlaksananya Pelatihan KHA untuk tenaga Pendidik dan Kependidikan Tingkat SMA	Seluruh Kab/Kota	2.00	249.867.350,00			2.00	249.867.350,00
2.2.84.25	Facilitasi Pembentukan APSA Kabupaten/Kota	Terbentuknya APSA di Kabupaten/Kota	Kelurahan Sukajadi, Kelurahan Merak Kota	2.00	185.000.000,00			2.00	185.000.000,00
2.2.84.26	Pelatihan Keterampilan Anak di LPKA	Persentase Anak yang mendapatkan Keterampilan di LPKA	Kelurahan Kabil	100.00	175.000.000,00			100.00	175.000.000,00
2.2.84.27	Pelatihan Kader PATBM di Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Kader/Aktiva yang Terlatih dalam PATBM	Kecamatan Batu Aji	60.00	200.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah		60.00	200.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (tahun rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Mula Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.2.34.28	Festival Anak Kepulauan Riau	Terbeksananya Festival Anak Kepulauan Riau	Kecamatan Bintan Timur	500.00	300.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah		500.00	300.000.000,00
2.2.35	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase perempuan (keluarga miskin) yang mendapatkan peningkatan kapasitas life skill		2.00	1.035.891.040,00			0.00	910.892.740,00
2.2.35.19	Peningkatan Ketahanan dan Kualitas Keluarga	Jumlah orang terlatih untuk peningkatan ketahanan dan kualitas keluarga	Seluruh Kab/Kota	150.00	144.598.300,00			150.00	0,00
2.2.35.20	Pengembangan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah perempuan terlatih untuk peningkatan kesejahteraan keluarga	Seluruh Kab/Kota	100.00	570.896.300,00	Pendapatan Asli Daerah		100.00	570.896.300,00
2.2.35.23	Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK R)	Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapatkan pembinaan Gatra	Seluruh Kab/Kota	35.00	139.956.440,00			35.00	139.956.440,00
2.2.35.24	Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah perempuan terlatih untuk peningkatan kesejahteraan keluarga	Kecamatan Bintan Kota	30.00	200.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah		30.00	200.000.000,00
2.8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				1.038.033.200,00				1.038.033.200,00
2.8.100	Program keluarga berencana	Pembentukan Kampung KB		1.00	1.038.033.200,00			0.00	1.038.033.200,00
		Persentase penggunaan alat kontrasepsi (CPR)		50.70				0.00	
2.8.100.5	Pemantapan dan Peminaan BKB, BRL, BKR (Tri Bina)	Terwujudnya keluarga yang berkualitas	Seluruh Kab/Kota	30.00	278.606.200,00	Pendapatan Asli Daerah		30.00	278.606.200,00
2.8.100.14	Sosialisasi dan Advokasi KIE tentang Pengendalian Penduduk dan KB di Prov. Kepri	Meningkatnya pengetahuan Pasangan Usia Subur (PUS)	Seluruh Kab/Kota	100.00	290.265.500,00	Pendapatan Asli Daerah		100.00	290.265.500,00



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.8.100.1.7	Pengembangan dan Pembentukan Program Kampung KB Terintegrasi	Terbentuknya kampung terintegrasi di Provinsi Kepri	Kecamatan Galang Kabupaten KampungsungaiKokumhan TakukUma	3,00	144.691.600,00	Pendapatan Asli Daerah		3,00	144.691.600,00
2.8.100.1.8	Pengembangan Program KKBPMD Tingkat Provinsi Kepulauan Riau	Terlaksananya pengembangan program KKBPMD tingkat provinsi kepulauan riau	Seluruh Kab/Kota	1,00	318.469.900,00	Pendapatan Asli Daerah		1,00	318.469.900,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang								
4.1	Perencanaan				944.621.200,00				944.621.200,00
4.1.15	Program Pengembangan Data/Informasi	Data/Informasi dan aplikasi sistem informasi dikelola dengan baik		12,00	300.628.500,00			0,00	300.628.500,00
4.1.15.5	Forum Data Pribi Gender dan Anak	Meningkatnya keterampilan Forum Data Gender dan Anak	Seluruh Kab/Kota	39,00	150.193.800,00	Pendapatan Asli Daerah		39,00	150.193.800,00
4.1.15.8	Relatihan dan Pendampingan Petugas Pengumpul Data	Jumlah OPD yang memiliki keterampilan menyusun data terlatih	Seluruh Kab/Kota	39,00	150.634.700,00	Pendapatan Asli Daerah		39,00	150.634.700,00
4.1.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat daerah yang tersusun		2,00	643.792.700,00			0,00	643.792.700,00
4.1.21.84	Penyusunan Renstra OPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan OPD	Seluruh Kab/Kota	1,00	150.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah		1,00	150.000.000,00
4.1.21.95	Rapat kerja sinkronisasi program	Jumlah Rapat Kerja	Seluruh Kab/Kota	1,00	248.670.400,00	Pendapatan Asli Daerah		1,00	248.670.400,00
4.1.21.13.6	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan urusan PP, PA dan KB (PUG, Anak, PP dan KB)	Jumlah Urutan yang di Monw (PP, PA, PUG dan KB)	Seluruh Kab/Kota	4,00	245.122.300,00	Pendapatan Asli Daerah		4,00	245.122.300,00

Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kepri tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan yang harus dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 di lingkup Dinas P3AP2KB, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2021 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2021. Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kepri tahun 2021 masih mengacu kepada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kepri tahun 2016-2021.

Sebagai upaya mewujudkan tercapainya target dari Rencana Kerja yang dituangkan dalam program dan kegiatan Dinas P3AP2KB Provinsi Kepri maka diperlukan adanya komitmen dalam hal :

1. Komitmen untuk melaksanakan dan mencapai target indicator kinerja semaksimal mungkin.
2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan didalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Mengevaluasi per Triwulan setiap kegiatan yang dilaksanakan agar dapat menentukan langkah-langkah tindak lanjut apabila ditemukan permasalahan dapat pelaksanaan dan pencapaian indicator kinerja.

Semoga Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kepulauan Riau TA 2021 ini dapat menjadi acuan atau pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan terkait dalam melaksanakan program dan kegiatan, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah. Akhir kata, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Kepala Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan  
anak, Pengendalian Penduduk dan KB  
Provinsi Kepulauan Riau



Misni, SKM, M.Si  
NIP. 19730516 199903 2 007



**DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN  
ANAK, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Jl. Sultan Mansyur Syah – Pulau Dompok  
Tlp. (0771) 455299  
Fax. (0771) 4575298